

WASPADA

WASPADA

Senin

6 November 2017

B12

FH UMA Dan YIB Kerjasama Pemenuhan Hak Andik Pas

FAKULTAS Hukum (FH) Universitas Medan Area (UMA) dan Yayasan Inspirasi Bangsa (YIB) menandatangani nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemenuhan hak anak didik masyarakat (Andik Pas), di Convention Hall Kampus I UMA, Jl. Kolam Medan Estate, Kamis (2/11). MoU itu ditandatangani langsung Dekan FH UMA Dr. Utary Maharany Barus dan Ketua Umum YIB Wanda Syahputra SH, disaksikan Wakil Rektor (WR) III UMA Bidang Kemahasiswaan Ir Zulheri Noer MP, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Hj Nurlela MAP, Kanit Polmas Binmas Polrestabes Medan AKP Gunawan SH, dan Kepala Lembaga Masyarakat Khusus Anak (LPKA) Klas I A Medan Sri Bulan S SH MHum.

Wakil Rektor III UMA Zulheri Noer dalam kata sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi dari visi dan misi UMA untuk membangun peradaban bangsa. Tetapi harus ada tindakan-tindakan nyata yang bermanfaat dan kajian-kajian yang langsung menyentuh persoalan-persoalan faktual yang ada di tengah-tengah masyarakat. "Artinya perguruan tinggi tidak cukup hanya terpaku, sehingga mengabaikan terhadap persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat seperti persoalan anak. Program ini tidak hanya mahasiswa yang bisa mengabdikan dirinya tetapi juga para dosen melakukan penelitian tentang anak," ujarnya di depan ratusan mahasiswa FH UMA.

Dekan FH UMA Utary Maharany Barus mengatakan, dalam pelaksanaan kerja sama pemenuhan hak-hak Andik Pas ini, FH UMA juga melibatkan dosen, mahasiswa dan Ikatan Alumni Magister Ilmu Hukum UMA. "Kegiatan sangat positif karena akan menjadi ajang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat," kata dekan. Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) diwakili Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hj Nurlela, menyambut baik kerja sama FH UMA dan YIB. Menurutnya, Pemprovsu melalui dinas yang dipimpinya siap membantu YIB dan UMA untuk memperluas asesmentnya ke kabupaten/kota. "Kita akan fasilitasi YIB dan FH UMA untuk memperluas programnya ke kabupaten/kota," katanya. (m49/C)

HARIAN**Analisa**

Senin, 6 November 2017

Halaman 6

**Untuk Pemenuhan Hak Andik Pas
FH UMA dan YIB Sepakati MoU****Medan, (Analisa)**

Fakultas Hukum (FH) Universitas Medan Area (UMA) dan Yayasan Inspirasi Bangsa (YIB) menandatangani nota kesepahaman kerja sama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait pemenuhan hak anak didik masyarakat (Andik Pas), di Convention Hall Kampus I UMA, Jalan Kolam Medan Estate, Kamis (2/11).

Dekan FH UMA Dr Utary Maharany Barus SH MHum dan Ketua Umum YIB Wanda Syahputra SH menandatangani langsung MoU tersebut, disaksikan Wakil Rektor (WR) III UMA Bidang Kemahasiswaan Ir Zulheri Noer MP, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprowsu) Hj Nurlela MAP, Kanit Polmas Binmas Polrestabes Medan AKP Gunawan SH, dan Kepala Lembaga Masyarakat Khusus Anak (LPKA) Klas I A Medan Sri Bulan S SH MHum.

Wakil Rektor III UMA Zulheri Noer dalam kata sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi

dari visi dan misi UMA untuk membangun peradaban bangsa. Tetapi harus ada tindakan-tindakan nyata yang bermanfaat dan kajian-kajian yang langsung menyentuh persoalan-persoalan faktual yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“Artinya perguruan tinggi tidak cukup hanya terpaku, sehingga mengabaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat seperti persoalan anak. Program ini tidak hanya mahasiswa yang bisa mengabdikan dirinya tetapi juga para dosen melakukan penelitian tentang anak,” ujarnya.

Dekan FH UMA Utary Maharany Barus mengatakan, dalam pelaksanaan kerja sama pemenuhan hak-hak Andik Pas ini, FH UMA juga melibatkan dosen, mahasiswa dan Ikatan Alumni Magister Ilmu Hukum UMA.

“Kegiatan sangat positif karena akan menjadi ajang pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi, yakni pengabdian masyarakat,” katanya

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) diwakili Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Hj Nurlela, menyambut baik kerja sama FH UMA dan YIB.

Menurutnya, Pemprowsu melalui dinas yang dipimpinnya siap membantu YIB dan UMA untuk memperluas asesmennya ke kabupaten/kota. “Kita akan fasilitasi YIB dan FH UMA untuk memperluas programnya ke kabupaten/kota,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumut diwakili Kepala LPKA Klas I A Medan Sri Bulan menjelaskan, lapas anak ini tentu masih banyak persoalan yang perlu dibenahi. Karenanya ia mengapresiasi FH UMA yang telah menginisiasi acara ini.

“Mudah-mudahan acara ini akan menghasilkan masukan-masukan yang positif terutama terkait pemenuhan hak-hak anak didik masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan itu juga diisi dengan bincang-bincang dan *talk show* tentang hak-hak anak baik yang masih menjadi binaan LPKA atau sudah lepas dari binaan. (twh)

HARIAN

REALITAS

Jumat, 3 November 2017

REALITAS 3



Dekan FH UMA Utary Maharany Barus (kelima dari kiri) disaksikan Wakil Rektor III UMA Zulheri Noer dan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemprov Sumatera Utara Hj Nurlela, menyerahkan cenderamata kepada Ketua Umum YIB Wanda Syahtu SH, seusa penandatanganan MoU di Convention Hall UMA, Kamis (2/11).

FH UMA dan YIB Kerja Sama Pemenuhan Hak Andik Pas

Medan, Realitas

Fakultas Hukum (FH) Universitas Medan Area (UMA) dan Yayasan Inspirasi Bangsa (YIB) menandatangani nota kesepahaman kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemenuhan hak anak didik pemsarakatan (Andik Pas), di Convention Hall Kampus I UMA, Jalan Kolam Medan Estate, Kamis (2/11).

MoU itu ditandatangani langsung Dekan FH UMA Dr. Utary Maharany Barus SH MHum dan Ketua Umum YIB Wanda Syahtu SH, disaksikan Wakil Rektor (WR) III UMA Bidang Kemahasiswaan Ir Zulheri Noer MP, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (PemprovSU) Hj Nurlela, MAH, dan Ketua Dis-

kan implementasi dari visi dan misi UMA untuk membangun peradaban bangsa. Tetapi harus ada tindakan-tindakan nyata yang bermanfaat dan kajian-kajian yang langsung menyentuh persoalan-persoalan faktual yang ada di tengah-tengah masyarakat.

"Artinya perguruan tinggi tidak cukup hanya terpaku, sehingga mengabaikan terhadap persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat seperti persoalan anak. Program ini tidak hanya mahasiswa yang bisa mengabdikan dirinya tetapi juga para dosen melakukan penelitian tentang anak," ujarnya di depan ratusan mahasiswa FH UMA.

Dekan FH UMA Utary Maharany Barus mengatakan, dalam pelaksanaan kerja sama pemenuhan hak-hak Andik Pas ini, FH UMA

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hj Nurlela, menyambut baik kerja sama FH UMA dan YIB. Menurutnya, PemprovSU melalui dinas yang dipimpinya siap membantu YIB dan UMA untuk memperluas asesmentnya ke kabupaten/kota. "Kita akan fasilitasi YIB dan FH UMA untuk memperluas programnya ke kabupaten/kota," katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumut diwakili Kepala Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas I A Medan Sri Bulan menjelaskan, lapas anak ini tentu masih banyak persoalan yang perlu dibenahi. Karenanya ia mengapresiasi FH UMA dan YIB yang telah menginisiasi acara ini.

"Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan manfaat

HARIAN andadas

Hal.

2

UMA dan YIB Kerja Sama Pemenuhan Hak Andik Pas

andadas

andadas
 Fakultas Hukum (FH) Uni-
 versitas Medan Area (UMA)
 mengadakan Inspirasi Bangsa
 dan menandatangani nota ke-
 nangan kerja sama atau
 Memorandum of Understanding
 (MoU) terkait pemenuhan hak
 anak di pemasyarakatan
 (Andik Pas), di Convention Hall
 I UMA, Jalan Kolam
 Estate, Kamis (2/11).

Acara ini ditandatangani lang-
 sung oleh Dekan FH UMA Dr Utary
 Maharany Barus SH MHum
 dan Ketua Umum YIB Wanda
 Syahputra SH, disaksikan Wa-
 kil Rektor III UMA Bi-
 mahasiswaan Ir Zulheri
 Noer, Kepala Dinas (Kadis)
 Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Peme-
 ntah Provinsi Sumatera Uta-
 ra (Prowas) Hj Nurlela,
 Kepala Polmas Binmas
 Besbes Medan AKP Guna-
 dan Kepala Lembaga
 Pemasyarakatan Khusus Anak
 Kelas I A Medan Sri



DEKAN FH UMA Utary Maharany Barus (kelima dari kiri) disaksikan Wakil Rektor III UMA Zulheri Noer dan Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prowas Hj Nurlela, menyerahkan cenderamata kepada Ketua Umum YIB Wanda Syahputra SH, sesuai penandatanganan MoU di Convention Hall UMA, Kamis (2/11).

Bulan S SH MHum.

Wakil Rektor III UMA Zul-
 heri Noer dalam kata sambutan-
 nya mengatakan, kegiatan ini
 merupakan implementasi dari
 visi dan misi UMA untuk mem-
 bangun peradaban bangsa. Te-
 tapi harus ada tindakan-tindakan
 nyata yang bermanfaat dan ka-

ajian-kajian yang langsung me-
 nyentuh persoalan-persoalan
 faktual yang ada di tengah-
 tengah masyarakat.

"Artinya perguruan tinggi
 tidak cukup hanya terpaku, se-
 hingga mengabaikan terhadap
 persoalan-persoalan di tengah-
 tengah masyarakat seperti per-

soalan anak. Program ini tidak
 hanya mahasiswa yang bisa
 mengabdikan dirinya tetapi juga
 para dosen melakukan pene-
 litian tentang anak," ujarnya
 di depan ratusan mahasiswa FH
 UMA.

Dekan FH UMA Utary Ma-
 harany Barus mengatakan, da-
 lam pelaksanaan kerja sama
 pemenuhan hak-hak Andik Pas
 ini, FH UMA juga melibatkan
 dosen, mahasiswa dan Ikatan
 Alumni Magister Ilmu Hukum
 UMA. "Kegiatan sangat positif
 karena akan menjadi ajang pe-
 laksanaan tridarma perguruan
 tinggi, yakni pengabdian ke-
 pada masyarakat," kata dekan.

Wakil Gubernur Sumatera
 Utara (Wagubsu) diwakili Kadis
 Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Hj Nurlela,
 menyambut baik kerjasama FH
 UMA dan YIB. Menurutnya,
 Prowas melalui dinas yang
 dipimpinnya siap membantu
 YIB dan UMA untuk mem-
 perluas asesmentnya ke kabu-

paten/kota. "Kita akan fasilitasi
 YIB dan FH UMA untuk mem-
 perluas programnya ke kabu-
 paten/kota," katanya.

Dalam kesempatan itu, Ke-
 pala Kanwil Kementerian Hu-
 kum dan Hak Asasi Manusia
 (Kemenkumham) Sumut diwa-
 kili Kepala Lembaga Pemasya-
 rakatan Khusus Anak (LPKA)
 Kelas I A Medan Sri Bulan me-
 jelaskan, lapas anak ini tentu
 masih banyak persoalan yang
 perlu dibenahi. Karenanya ia
 mengapresiasi FH UMA yang
 telah menginisiasi acara ini.

"Mudah-mudahan acara ini
 akan menghasilkan masukan-
 masukan yang positif terutama
 terkait pemenuhan hak-hak
 anak di dipemasyarakatan,"
 sebutnya.

Kegiatan itu juga diisi de-
 ngan bincang-bincang dan talk
 show tentang hak-hak anak baik
 yang masih menjadi binaan
 LPKA Anak maupun mantan
 binaan.

Medan **Bisnis**

VI
Jumat, 3 November 2017

UMA dan YIB Tandatangani MoU

endra

Bisnis – Medan

ltas Hukum Universitas n Area (FH UMA) dan n Inspirasi Bangsa (YIB) datangani nota kesepa- /*memorandum of understanding* (MoU) terkait pe- an hak anak didik pe- rakatan (Andik PAS), di ntion Hall UMA, Jalan . Medan Estate, Kamis (2/ giatan itu diisi dengan n bincang-bincang dan iow.

itu ditandatangani lang- ntara Dekan FH UMA Maharany Barus SH dengan Ketua Umum arda Syahputra SH dan kan Wakil Rektor (WR) ang Kemahasiswaan Ir Noer MP, Kepala Dinas Pemberdaya Perempuan k Pemerintahan Provinsi a Utara (PemprovSU)

Nurlela, Kanit Polmas Binmas Polrestabes Medan Akp Gunawan SH, dan Kepala Lembaga Masyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas I A Medan Seri Bulan S SH MHum.

Menurut Zulheri Noer, kegiatan ini merupakan implementasi dari visi dan misi UMA untuk membangun peradaban bangsa.

"Tetapi harus ada tindakan-tindakan nyata yang bermanfaat dan kajian-kajian yang langsung menyentuh persoalan-persoalan faktual yang ada di tengah-tengah masyarakat. Artinya perguruan tinggi tidak cukup hanya terpaku, sehingga mengabaikan terhadap persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Program ini tidak hanya mahasiswa yang bisa digabdikan dirinya tetapi juga para dosen melakukan penelitian," katanya.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham) Sumut diwakili

Kepala Lembaga Masyarakatan Khusus Anak (LPKA) Klas I A Medan Seri Bulan S SH MHum menjelaskan, lapas anak ini tentu masih banyak persoalan yang perlu dibenahi. Karenanya ia mengapresiasi FH UMA yang telah menginisiasi acara ini.

"Mudah-mudahan acara ini akan menghasilkan masukan-masukan yang positif terutama terkait pemenuhan hak-hak anak didik masyarakatan," katanya.

Wakil Gubernur Sumatera Utara (WagubSU) diwakili Kadis Pemberdaya Perempuan dan Anak PemprovSU Nurlela, menyambut baik terhadap respon Yayasan H Agus Salim UMA.

"PemprovSU melalui Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Anak memberikan apresiasi kepada UMA yang siap memberikan dan menjadi pendamping pemenuhan hak Andik PAS," ujar Nurlela.

Dia menegaskan, Dinas Pemberdayan Perempuan dan Anak siap memberikan pendampingan untuk membantu YIB memperluas asesmentnya ke kabupaten/kota. "kita akan fasilitasi ke kabupaten/kota," katanya. ●



MoU

Dekan Fakultas Hukum UMA Utary Maharany Barus SH MHum menandatangani nota kesepahaman/*memorandum of understanding* (MoU) terkait pemenuhan hak anak didik masyarakatan (Andik PAS) dengan Ketua Umum Yayasan Inspirasi Bangsa (YIB) Warda Syahputra SH di Convention Hall UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, Kamis (2/11).

■ [medanbisnis/zahendra](#)

No. Form : FM-HPT-01-01
Rev: 00
Tgl Eff. 01 Des 2012

WASPADA

WASPADA

Senin

20 November 2017

B5

Mantan Ketua MK Di UMA: Penegakan Hukum Belum Lepas Dari Intervensi Politik

MEDAN (Waspada): Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Hamdan Zoelva mengatakan, penegakan hukum di Indonesia dinilai belum lepas dari intervensi politik. Intervensi tidak hanya pada pembentukan produk hukum, namun juga pada proses pelaksanaan di lembaga peradilan.

"Selain pengaruh politik, budaya, dan ekonomi, juga masih kuat mengganggu penegakan hukum secara adil," kata Prof. Hamdan Zoelva ketika memberikan kuliah umum di Pascasarjana Universitas Medan Area (UMA), Jumat (18/11) malam.

Kuliah umum bertajuk: "Penegakan Hukum antara Cita dan Realita" dibuka Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UMA, Prof. H. Zulkarnain Lubis Ph.D didampingi Dekan Fakultas Hukum UMA, Dr. Utary Maharani Barus dan pimpinan pascasarjana UMA dan dihadiri Kabag Humas UMA, Asmah Indrawaty, mahasiswa S1 dan S2 UMA.

Lebih lanjut, Prof. Hamdan Zoelva menegaskan, meski Indonesia sudah lepas dari era pemerintahan otoriter, namun intervensi politik, ekonomi, dan

hukum di negeri ini masih dipengaruhi faktor, sosial politik, ekonomi, dan budaya," tegasnya. Transaksi politik masih kental mempengaruhi hukum di Indonesia. Dia mencontoh, kalau pembutan produk hukum sudah rusak, maka penegakannya juga rusak.

Menurutnya, tidak jarang, produk hukum dihasilkan masih lebih mementingkan kepentingan dan kompromi politik dibandingkan rakyat. Hal ini dapat terlihat banyak produk hukum yang dihasilkan di DPR justru kemudian diujikan ke Mahkamah Konstitusi.

"Proses pembentukan UU memang tidak dapat dilepaskan dari transaksi politik. Namun yang terpenting juga adalah bagaimana agar proses pelaksanaan penegakan hukum di lembaga peradilan bisa menjadi mandiri," tegasnya. Disamping faktor diatas, kesejahteraan aparat penegak hukum juga mempengaruhi penegakan hukum.

Telah lazim diungkapkan bahwa hukum khususnya dalam bentuknya sebagai undang-undang merupakan produk politik, artinya ialah UU dibentuk sebagai hasil kompromi dari berbagai kekuatan sosial. Artinya dalam realitas empirisnya

Dia mengatakan, kasus Setya Novanto salah satu bahwa penegakan hukum tidak lepas dari intervensi politik. Seharusnya, Setnov selaku ketua DPR memberikan contoh kepada rakyat bagaimana menghormati hukum. Bukan sebaliknya terkesan mempermainkan hukum. "Drama Setnov seakan ini membangun opini publik, beta pasulitnya menerapkan hukum kepada pejabat tinggi negara, sebaliknya kepada rakyat kecil sangat mudah," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IVUMA, Prof. Zulkarnain Lubis, Ph.D mengapresiasi kehadiran Prof. Hamdan Zoelva berbagi ilmu dengan para mahasiswa UMA. Pencerahan tentang ilmu hukum yang disampaikan

narasumber sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam memahami hukum.

Kehadiran mantan ketua MK dan sejumlah tokoh nasional maupun internasional ke UMA, menurutnya, merupakan bagian dari upaya UMA meningkatkan kualitas mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

Karena itu, ia meminta mahasiswa dapat menyerap semua ilmu yang disampaikan Prof. Hamdan Zoelva. "UMA terus menghadirkan orang-orang hebat, disamping terus membangun kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas mutu UMA," katanya. (m491)



HARIAN

Analisa

Senin, 20 November 2017

Halaman 5



Analisa/istimewa

KULIAH UMUM: Mantan Ketua MK Prof Hamdan Zoelva (tiga kiri) didampingi WR IV UMA Prof Zulkarnain Lubis' (dua kiri), dan Dekan Fakultas Hukum UMA Dr Utary Maharani Barus MH (kanan), saat menyampaikan kuliah umum di Kampus PPs UMA, Jumat (17/11) malam.

Prof Hamdan Zoelva:

Penegakan Hukum Belum Lepas dari Intervensi

Medan, (Analisa)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Dr Hamdan Zoelva SHMH, menilai penegakan hukum di Indonesia masih belum lepas dari intervensi politik.

Intervensi, katanya, tidak hanya pada pembentukan produk hukum, namun juga pada proses pelaksanaannya di lembaga peradilan.

Hal itu disampaikan, ketika memberikan kuliah umum di Kampus Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area (UMA), Jalan Setiabudi/Sei Serayu Medan, Jumat (17/11) malam.

Kuliah umum bertema "Penegakan Hukum Antara Cita-cita Realita" itu dibuka Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UMA Prof Ir H Zulkarnain

Lubis MS PhD, dan dihadiri Dekan Fakultas Hukum UMA Dr Utary Maharani Barus MH, pimpinan PPs UMA, Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawaty MP, mahasiswa S1 dan S2 UMA.

"Selain pengaruh politik, budaya, dan ekonomi juga masih kuat mengganggu penegakan hukum secara adil," kata Prof Hamdan Zoelva

Lebih lanjut ditegaskannya, meski Indonesia sudah lepas dari era pemerintahan otoriter, tetapi intervensi politik, ekonomi, dan budaya masih belum dapat dilepaskan. Tentu hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum.

"Independensi penegakan hukum di negeri ini masih dipengaruhi faktor sosial,

politik, ekonomi, dan budaya. Bahkan, transaksi politik masih kental memengaruhi hukum di Indonesia," ungkap Zoelva.

Disebutkannya, jika pembuatan produk hukum sudah rusak, maka penegakannya juga rusak. Tidak jarang, produk hukum yang dihasilkan masih lebih mementingkan kepentingan dan kompromi politik dibandingkan rakyat.

Kasus Setnov

Hal ini dapat terlihat dari banyaknya produk hukum yang dihasilkan DPR justru kemudian diuji (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.

Dia mengatakan, kasus Setya Novanto (Setnov) salah satu contoh penegakan hukum tidak lepas dari inter-

vensi politik. Seharusnya, Setnov selaku Ketua DPR memberikan contoh kepada rakyat bagaimana menghormati hukum. Bukan sebaliknya

kum kepada pejabat tinggi negara, sebaliknya kepada rakyat kecil sangat mudah," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IV UMA Prof Zulkarnain

hukum yang disampaikan narasumber sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam memahami hukum.

UMA meningkatkan kualitas mahasiswanya sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

Karena itu, UMA akan terus menghadirkan orano-

HARIAN REALITAS

Senin, 20 Nopember 2017

REALITAS 12

Prof Hamdan Zoelva: Penegakan Hukum Belum Lepas dari Intervensi Politik

Medan, Realitas

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Hamdan Zoelva SH MH menilai, penegakan hukum di Indonesia masih belum lepas dari intervensi politik. Intervensi tidak hanya pada pembentukan produk hukum, namun juga pada proses pelaksanaannya di lembaga peradilan.

"Selain pengaruh politik, budaya, dan ekonomi juga masih kuat mengganggu penegakan hukum secara adil," kata Prof Hamdan Zoelva ketika memberikan kuliah umum di Kampus Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area (UMA), Jalan Setia Budi/Sei Serayu Medan, Jumat (18/11) malam.

Kuliah umum bertajuk "Penegakan Hukum Antara Cita-cita Realita" itu dibuka Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UMA Prof Ir H

Zulkarnain Lubis MS PhD, dihadiri Dekan Fakultas Hukum UMA Dr Utary Maharani Barus MH, pimpinan PPs UMA, Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawaty MP, mahasiswa S1 dan S2 UMA.

Lebih lanjut Hamdan Zoelva menegaskan, meski Indonesia sudah lepas dari era pemerintahan otoriter, namun intervensi politik, ekonomi, dan budaya masih belum dapat dilepaskan. Tentu hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum.

"Independensi penegakan hukum di negeri ini masih dipengaruhi faktor sosial politik, ekonomi, dan budaya. Bahkan, transaksi politik masih kental mempengaruhi hukum di Indonesia," ungkap Zoelva seraya menambahkan, kalau pembuatan produk hukum sudah rusak, maka penegakannya juga rusak.

Menurutnya, tidak jarang, produk hukum yang dihasilkan masih lebih mementingkan kepentingan dan kompromi politik dibandingkan rakyat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya produk hukum yang dihasilkan DPR justru kemudian diuji (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Dia mengatakan, kasus Setya Novanto (Setnov) salah satu contoh bahwa penegakan hukum tidak lepas dari intervensi politik. Seharusnya, Setnov selaku Ketua DPR memberikan contoh kepada rakyat bagaimana menghormati hukum. Bukan sebaliknya terkesan mempermainkan hukum.

"Drama Setnov seakan ini membangun opini publik, betapa sulitnya menerapkan hukum kepada pejabat tinggi negara, sebaliknya kepada rakyat kecil sangat mudah," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IV UMA Prof Zulkarnain Lubis mengapresiasi kehadiran Prof Hamdan Zoelva berbagi ilmu dengan para mahasiswa UMA. Pencerahan tentang ilmu hukum yang disampaikan narasumber sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam memahami hukum.

"Kehadiran mantan ketua MK dan sejumlah tokoh nasional maupun internasional ke UMA, merupakan bagian dari upaya UMA meningkatkan kualitas mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Karena itu, UMA akan



HARIAN mandalas

Senin

20 November 2017

Hal.

4

PROF HAMDAN ZOELVA DI UMA:

Penegakan Hukum Belum Lepas dari Intervensi Politik

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Hamdan Zoelva SH MH menilai, penegakan hukum di Indonesia masih belum lepas dari intervensi politik. Intervensi tidak hanya pada pembentukan produk hukum, namun juga pada proses pelaksanaannya di lembaga peradilan.

"Selain pengaruh politik, budaya, dan ekonomi juga masih kuat mengganggu penegakan hukum secara adil," kata Prof Hamdan Zoelva ketika memberikan kuliah umum di Kampus Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area (UMA), Jalan Setiabudi/Sei Serayu Medan, Jumat (18/11) malam.

Kuliah umum bertajuk "Penegakan Hukum Antara Cita-cita Realita" itu dibuka Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UMA Prof Ir H Zulkarnain Lubis MS PhD, dihadiri Dekan Fakultas Hukum UMA Dr Utary Maharani Barus MH, pimpinan PPs UMA, Kabag Humas UMA Ir Aemah Indrawaty MP



Mantan Ketua MK Prof Hamdan Zoelva (kiri) diabadikan bersama WR IV UMA Prof Zulkarnain Lubis.

mahasiswa S1 dan S2 UMA.

Lebih lanjut Hamdan Zoelva menegaskan, meski Indonesia sudah lepas dari era pemerintahan otoriter, namun intervensi politik, ekonomi, dan budaya masih belum dapat dilepaskan. Tentu hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum.

"Independensi penegakan hukum di negeri ini masih dipengaruhi faktor sosial politik, ekonomi, dan budaya. Bahkan, transaksi politik masih kental memengaruhi hukum di Indonesia," sebut Zoelva

lepas dari intervensi politik. Seharusnya, Setnov selaku Ketua DPR memberikan contoh kepada rakyat bagaimana menghormati hukum. Bukan sebaliknya terkesan mempermainkan hukum.

"Drama Setnov seakan ini membangun opini publik, betapa sulitnya menerapkan hukum kepada pejabat tinggi negara, sebaliknya kepada rakyat kecil sangat mudah," ucapnya.

Sementara, Wakil Rektor IV UMA Prof Zulkarnain Lubis mengapresiasi kehadiran Prof Hamdan Zoelva berbagi ilmu dengan para mahasiswa UMA. Pencerahan tentang ilmu hukum yang disampaikan narasumber sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam memahami hukum.

"Kehadiran mantan ketua MK dan sejumlah tokoh nasional maupun internasional ke UMA, merupakan bagian dari upaya UMA meningkatkan kualitas mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Karena itu, UMA akan terus menghadirkan orang-orang hebat di setiap tahunnya sebagai mitra kerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas

menambahkan, pembutan produk hukum sudah rusak, maka penegakannya juga rusak.

Menurutnya, tidak jarang, produk hukum yang dihasilkan masih lebih mengutamakan kepentingan dan kompromi politik dibandingkan rakyat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya produk hukum yang dihasilkan DPR justru kemudian diuji (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Dia mengatakan, kasus Setya Novanto (Setnov) salah satu contoh penanganan hukum tidak

Harian JURNAL ASIA

JURNAL ASIA | SENIN 20 NOVEMBER 2017 | 5

Mantan Ketua MK di PPs UMA

Meningkatkan Wawasan Mahasiswa Sesuai Disiplin Ilmu

...a Mahkamah Prof Dr Hamdan menilai, penegakan hukum masih belum lepas dari intervensi politik. Intervensi tidak menentukan produk hukum pada proses pembaga peradilan. Politik, budaya, dan penegakan hukum Prof Hamdan Zoelva kuliah umum di Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area (UMA), Jalan ...y Medan, akhir

intervensi politik, ekonomi, dan budaya masih belum dapat dilepaskan. Tentu hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum. "Independensi penegakan hukum di negeri ini masih dipengaruhi faktor sosial politik, ekonomi, dan budaya. Bahkan, transaksi politik masih kentel memengaruhi hukum di Indonesia," ungkap Zoelva seraya menambahkan, kalau pembuatan produk hukum sudah rusak, maka penegakannya juga rusak.

Menurutnya, tidak jarang, produk hukum yang dihasilkan masih lebih mementingkan kepentingan dan kompromi politik dibandingkan rakyat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya produk hukum yang dihasilkan DPR justru kemudian diuji (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Dia mengatakan, kasus Setya Novanto (Setnov) salah satu contoh bahwa penegakan hukum tidak lepas dari intervensi politik. Seharusnya, selaku Ketua DPR memberikan contoh kepada rakyat bagaimana menghormati hukum. Bukan sebaliknya terkesan memperlakukan hukum. "Drama Setnov seakan ini membangun opini publik, betapa



Jurnal Asia | 1st

BERIKAN CERAMAH. Mantan Ketua MK Prof Hamdan Zoelva (kedua kanan) didampingi WR IV UMA Prof Zulkarnain Lubis (kedua kiri), dan Dekan Fakultas Hukum UMA Dr Utary Maharani Barus MH (kanan) saat menyampaikan kuliah umum di Kampus PPs UMA.

sulitnya menerapkan hukum kepada pejabat tinggi negara, sebaliknya kepada rakyat kecil sangat mudah," ucapnya.

Wakil Rektor IV UMA Prof Zulkarnain Lubis mengapresiasi kehadiran Prof Hamdan Zoelva berbagi ilmu dengan para mahasiswa. Pencerahan tentang

ilmu hukum yang disampaikan narasumber sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam memahami hukum.

"Kehadiran mantan ketua MK dan sejumlah tokoh nasional maupun internasional ke UMA, merupakan bagian dari upaya universitas ini

meningkatkan kualitas mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari," katanya. Karena itu, UMA akan terus menghadirkan orang-orang hebat, di samping terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas para lulusan. (swisma)

No. Form : FM-HPT-01-01
Rev : 00
Tgl Eff. 01 Des 2012

Berita Sore
Selasa
21 November 2017

12

Prof Hamdan Zoelva Kuliah Umum di UMA

MEDAN (Berita): Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Hamdan Zoelva SHMH menilai, penegakan hukum di Indonesia masih belum lepas dari intervensi politik. Intervensi tidak hanya pada pembentukan produk hukum, namun jugapada proses pelaksanaannya di lembaga peradilan.

"Selain pengaruh politik, budaya, dan ekonomi juga masih kuat mengganggu penegakan hukum secara adil," kata Prof Hamdan Zoelva ketika memberikan kuliah umum di Kampus Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area (UMA) Jalan Sei Serayu Medan, Jumat (18/11) malam.

Kuliah umum bertajuk "

Penegakan Hukum Antara Cita-cita Realita" itu dibuka Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UMA Prof Ir H Zulkarnain Lubis MS PhD, dihadiri Dekan Fakultas Hukum UMA Dr Utary Maharani Barus MH, pimpinan PPs UMA, Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawaty MP, mahasiswa S1 dan S2 UMA.

Lebih lanjut Hamdan Zoelva menegaskan, meski Indonesia sudah lepas dari era pemerintahan otoriter, namun intervensi politik, ekonomi, dan budaya masih belum dapat dilepaskan. Tentu hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum.

"Independensi penegakan hukum di negeri ini masih dipengaruhi faktor sosial politik,

ekonomi, dan budaya. Bahkan, transaksi politik masih kental memengaruhi hukum di Indonesia," ungkap Zoelva seraya menambahkan, kalau pembuatan produk hukum sudah rusak, maka penegakannya juga rusak.

Menurutnya, tidak jarang, produk hukum yang dihasilkan masih lebih mementingkan kepentingan dan kompromi politik dibandingkan rakyat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya produk hukum yang dihasilkan DPR justru kemudian diuji (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Diamengatakan, kasus Setya Novanto (Setnov) salah satu contoh bahwa penegakan hukum tidak lepas dari intervensi

politik. Seharusnya, Setnov selaku Ketua DPR memberikan contoh kepada rakyat bagaimana menghormati hukum. Bukan sebaliknya terkesan mem-permainkan hukum.

"Drama Setnov seakan ini membangun opini publik, betapa sulitnya menerapkan hukum kepada pejabat tinggi negara, sebaliknya kepada rakyat kecil sangat mudah," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IV UMA Prof Zulkarnain Lubis mengapresiasi kehadiran Prof Hamdan Zoelva berbagi ilmu dengan para mahasiswa UMA. Pencerahan tentang ilmu hukum yang disampaikan narasumber sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam memahami hukum.

"Kehadiran mantan ketua MK dan sejumlah tokoh nasional maupun internasional ke UMA, merupakan bagian dari upaya UMA meningkatkan kualitas mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Karena itu, UMA akan terus meningkatkan kualitasnya, di samping terus membangun kerja sama dengan berbagai pi-



liah Umum di UMA:

Hukum Belum Lepas dari Intervensi Politik

(UMA)Jalan Sei Serayu Medan, Jumat (18/11) malam.

Kuliah umum bertajuk "Penegakan Hukum Antara Cita-cita Realita" itu dibuka Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UMA Prof Ir H Zulkarnain Lubis MS PhD, dihadiri Dekan Fakultas Hukum UMA Dr Utary Maharani Barus MH, pimpinan PPs UMA, Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawaty MP, mahasiswa S1 dan S2 UMA.

Lebih lanjut Hamdan Zoelva menegaskan, meski Indonesia sudah lepas dari era pemerintahan otoriter, namun intervensi politik, ekonomi, dan budaya masih

belum dapat dilepaskan. Tentu hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum.

"Independensi penegakan hukum di negeri ini masih dipengaruhi faktor sosial politik, ekonomi, dan budaya. Bahkan, transaksi politik masih kental mempengaruhi hukum di Indonesia," ungkap Zoelva seraya menambahkan, kalau pembuatan produk hukum sudah rusak, maka penegakannya juga rusak.

Menurutnya, tidak jarang, produk hukum yang dihasilkan masih lebih mementingkan kepentingan dan kompromi politik dibandingkan rakyat. Hal ini

dapat terlihat dari banyaknya produk hukum yang dihasilkan DPR justru kemudian diuji (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Dia mengatakan, kasus Setya Novanto (Setnov) salah satu contoh bahwa penegakan hukum tidak lepas dari intervensi politik. Seharusnya, Setnov selaku Ketua DPR memberikan contoh kepada rakyat bagaimana menghormati hukum. Bukan sebaliknya terkesan memperlakukan hukum.

"Drama Setnov seakan ini membangun opini publik, betapa sulitnya menerapkan hukum kepada pejabat



Mantan Ketua MK Prof Hamdan Zoelva (ketiga dari kiri) didampingi WR IV UMA Prof Zulkarnain Lubis (kedua dari kiri), dan Dekan Fakultas Hukum UMA Dr Utary Maharani Barus MH (kanan) menyampaikan kuliah umum di Kampus PPs UMA. **BPB/Ist**

tinggi negara, sebaliknya kepada rakyat kecil sangat mudah," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IV UMA Prof Zulkarnain Lubis mengapresiasi kehadiran Prof Hamdan Zoelva berbagi ilmu dengan para mahasiswa UMA. Pencerahan tentang ilmu

hukum yang disampaikan narasumber sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam memahami hukum.

"Kehadiran mantan ketua MK dan sejumlah tokoh nasional maupun internasional ke UMA, merupakan bagian dari upaya

UMA meningkatkan kualitas mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Karena itu, UMA akan terus menghadirkan orang-orang hebat, di samping terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas UMA," katanya. **M-5**

No. Form : FM-HPT-01-01
 Rev: 00
 Tgl Eff. 01 Des 2012

WASPADA

B12

DA

er 2017

Ademisi Rekomendasi Perbaikan Hukum Indonesia

AS Hukum (FH) Universitas Medan Area (UMA) seminar nasional bertajuk "Problematika Hukum", di gedung serbaguna Kampus 1 UMA Jl. Kolam, ate, Kamis (23/11).

Seminar menghadirkan narasumber dari berbagai universitas di Indonesia. Kegiatan ini, digelar dalam rangka membahas dan memberi rekomendasi untuk perbaikan hukum di tanah air. Dekan FH UMA, Dr. Utari Maharani Barus mengatakan,

narasumber ada sekitar 15 peneliti dari berbagai universitas. Selain FH UMA sendiri, di antaranya FH USU, FH Universitas Islam Yogyakarta, FH Universitas Sriwijaya Palembang dan FH Universitas Mulawarman Samarinda.

Para narasumber mempresentasikan hasil risetnya tentang persepektif hukum yang berbeda-beda. Mulai dari hukum pidana (pencabulan), perdata, perceraian, pertanahan, bisnis atau persaingan usaha, administrasi hingga tata negara.

"Seminar ini terselenggara berkat kerja sama dengan kelompok atau dosen muda

dari FH USU yang melakukan penelitian. Dan, dipadukan dengan dosen FH UMA serta beberapa peneliti di bidang hukum dari tiga universitas lainnya di luar Sumut. Oleh karenanya, dari persepektif hukum yang berbeda tersebut dipilih tema 'Problematika Hukum di Indonesia,'" ungkap Dr Utari.

Disebutkannya, pada seminar ini karena yang dipresentasikan merupakan hasil penelitian, maka ada suatu rekomendasi yang diusulkan terhadap persoalan hukum di Indonesia saat ini.

Rekomendasi tersebut nantinya disampaikan kepada pemerintah atau lembaga terkait, dalam rangka perubahan atau perbaikan hukum di negeri ini.

"Seminar ini sangat bagus dan juga salah satu program kerja kami, yaitu berupaya untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi dosen. Tak hanya itu, berdampak terhadap akreditasi di FH UMA ke depannya," jelas Utari.

Sementara, Ketua Panitia seminar tersebut, Zaini Munawir SH MHum menuturkan, kegiatan ilmiah ini tak hanya bermanfaat bagi dosen.

Melainkan, juga bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikuti." Mahasiswa yang mengikuti seminar ini tak hanya dari FH UMA sendiri, tetapi juga ada sekitar 11 perguruan tinggi di Medan," tutur Zaini. (m49/C)



Selamat dan Sukses
SEMINAR NASIONAL

Waspada/M.Ferdinan Sembiring

UMA, Dr Utari Maharani Barus (tengah) diabadikan bersama narasumber nasional 'Problematika Hukum di Indonesia' di UMA

No. Form : FM-HPT-01-01
Rev: 00
Tgl Eff. 01 Des 2012

HARIAN Analisa

Sabtu, 25 November 2017

Halaman 9

Masyarakat Kurang Percaya pada Penegak Hukum

FH UMA Seminarkan Hukum

Medan, (Analisa)

Saat ini masyarakat semakin kurang percaya kepada penegak hukum. Sebab mereka (masyarakat-red) melihat apa yang terjadi saat ini penegakan hukum selalu diintervensi oleh kekuatan politik.

Tidak itu saja, masyarakat melihat para oknum pejabat publik dan oknum penegak hukum yang korupsi, selalu mencari celah agar tidak dihukum.

Dekan Fakultas Hukum (FH) UMA, Dr Utari Maharani mengungkapkan hal itu ketika menjawab *Analisa*, di sela-sela seminar nasional bertajuk "Problematika Hukum di Indonesia" Kamis (23/11) di Convention Hall Kampus I UMA Jalan Kolam Medan Esate.

Seminar tersebut menampilkan 15 peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) yang juga sebagai panitia pelaksana.

Didampingi Kabag Humas UMA, Ir Asmah Indrawati MP, lebih lanjut Utari mengatakan intervensi terhadap proses penegakan hukum di Indonesia sangat kuat, sehingga masyarakat menilai penegakan hukum kurang berkeadilan atau dengan istilah "runcing ke bawah namun tumpul ke atas"

"Untuk itu UMA berupaya berkontribusi memperbaiki hukum nasional.

berikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga penegak hukum dalam upaya menjawab problematika hukum di Indonesia sehingga ada perbaikan hukum," ungkap Dr Utari.

Para narasumber, ungkap Dekan Fakultas Hukum UMA ini mempresentasikan hasil penelitiannya tentang persoalan hukum di tengah masyarakat dari berbagai perspektif. Mulai dari hukum pidana (pencabulan), perdata, perceraian, pertanahan, bisnis dan persaingan bisnis, administratif dan tata negara.

"Perspektif inilah yang dikaji dan dibahas. Hasil pembahasan serta

solusinya akan direkomendasikan kepada instansi terkait," ucap Dr Utari seraya menambahkan kegiatan tersebut juga salah satu program kerja Fakultas Hukum UMA.

Sebelumnya, Ketua Panitia Zaini Munawir SH MHum menyampaikan seminar hukum ini diikuti mahasiswa Fakultas Hukum UMA dan juga dosen dari berbagai universitas di Indonesia.

"Kegiatan ini tak hanya bermanfaat kepada dosen, tapi juga mahasiswa guna menambah wawasan tentang problematika hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat," ujar Zaini Munawir. (twh)



PARA PENELITI: Dekan Fakultas Hukum UMA, Dr Utari Maharani (di tengah, jilbab putih) berfoto bersama dengan para peneliti yang tampil sebagai pembicara dalam seminar nasional bertajuk "Problematika Hukum di

HARIAN

REALITAS

Jumat, 24 Nopember 2017

UMA Gelar Seminar Problematika Hukum di Indonesia

Medan, Realitas

Fakultas Hukum (FH) Universitas Medan Area (UMA) menggelar seminar nasional bertajuk 'Problematika Hukum di Indonesia', yang berlangsung di gedung serbaguna Kampus Utama Jalan Kolam, Medan Estate, Kamis (23/11).

Seminar yang menghadirkan narasumber dari berbagai universitas di Indonesia ini, digelar dalam rangka membahas dan memberi rekomendasi untuk perbaikan hukum di tanah air.

Dekan FH UMA, Dr Utari Maharani Barus SH MHum mengungkapkan, yang menjadi narasumber ada sekitar 15 peneliti dari berbagai universitas. Selain FH UMA sendiri, di antaranya FH USU, FH Universitas Islam Yogyakarta, FH Universitas Sriwijaya Palembang dan FH Universitas Mulawarman Samarinda.

Para narasumber mempresentasikan hasil risetnya tentang persepektif hukum yang berbeda-beda. Mulai dari hukum pidana (pencabulan), perdata, perceraian, pertanahan, bisnis atau persaingan usaha, administrasi hingga tata negara.

"Seminar ini terselenggara berkat kerja sama dengan kelompok atau dosen muda dari FH USU yang melakukan penelitian. Dan,

dipadukan dengan dosen FH UMA serta beberapa peneliti di bidang hukum dari tiga universitas lainnya di luar Sumut. Oleh karenanya, dari persepektif hukum yang berbeda tersebut dipilih tema 'Problematika Hukum di Indonesia', ungkap Dr Utari.

Disebutkannya, pada seminar ini karena yang dipresentasikan merupakan hasil penelitian, maka ada suatu rekomendasi yang di-

usulkan terhadap persoalan hukum di Indonesia saat ini. Rekomendasi tersebut nantinya disampaikan kepada pemerintah atau lembaga terkait, dalam rangka perubahan atau perbaikan hukum di negeri ini.

"Seminar ini sangat bagus dan juga salah satu program kerja kami, yaitu berupaya untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi dosen. Tak hanya itu, berdampak terhadap akreditasi di FH UMA ke

depannya," jelas Utari.

Sementara, Ketua Panitia seminar tersebut, Zaini Munawir SH MHum menuturkan, kegiatan ilmiah ini tak hanya bermanfaat bagi dosen. Melainkan, juga bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikuti.

"Mahasiswa yang mengikuti seminar ini tak hanya dari FH UMA sendiri, tetapi juga ada sekitar 11 perguruan tinggi di Medan," tutur Zaini. (RJI)



Dekan Fakultas Hukum UMA, Dr Utari Maharani Barus SH MHum (tengah) foto bersama dengan narasumber, pada seminarnasional 'Problematika Hukum di Indonesia' di gedung serbaguna Kampus Utama Jalan Kolam, Medan Estate, Kamis (23/11).

Medan **Bisnis**

VI

Jumat, 24 November 2017

Seminar Nasional di UMA Rekomendasikan Perbaikan Problematika Hukum di Indonesia

zahendra

MedanBisnis –Medan

Fakultas Hukum (FH) Universitas Medan Area (UMA) menggelar seminar nasional bertajuk 'Problematika Hukum di Indonesia', yang berlangsung di gedung serbaguna kampus Utama Jalan Kolam, Medan Estate, Kamis (23/11). Seminar yang menghadirkan narasumber dari berbagai universitas di Indonesia ini, digelar dalam rangka membahas dan memberi rekomendasi untuk

perbaikan hukum di tanah air.

Dekan FH UMA Dr Utari Maharani Barus SH MHum mengungkapkan, yang menjadi narasumber ada sekitar 15 peneliti dari berbagai universitas. Selain FH UMA sendiri, di antaranya FH USU, FH Universitas Islam Yogyakarta, FH Universitas Sriwijaya Palembang dan FH Universitas Mulawarman Samarinda.

Para narasumber mempresentasikan hasil risetnya tentang persepektif hukum yang berbeda-beda. Mulai dari hukum pidana (pencabulan),

perdata, perceraian, pertanahan, bisnis atau persaingan usaha, administrasi hingga tata negara.

"Seminar ini terselenggara berkat kerja sama dengan kelompok atau dosen muda dari FH USU yang melakukan penelitian. Dan, dipadukan dengan dosen FH UMA serta beberapa peneliti di bidang hukum dari tiga universitas lainnya di luar Sumut. Oleh karenanya, dari persepektif hukum yang berbeda tersebut dipilih tema 'Problematika Hukum di Indonesia,'" ungkap

Dr Utari.

Disebutkannya, pada seminar ini karena yang dipresentasikan merupakan hasil penelitian, maka ada suatu rekomendasi yang diusulkan terhadap persoalan hukum di Indonesia saat ini. Rekomendasi tersebut nantinya disampaikan kepada pemerintah atau lembaga terkait, dalam rangka perubahan atau perbaikan hukum di negeri ini.

"Seminar ini sangat bagus dan juga salah satu program kerja kami, yaitu berupaya untuk meningkatkan kemam-

puan atau kompetensi dosen. Tak hanya itu, berdampak terhadap akreditasi di FH UMA ke depannya," jelas Utari.

Sementara, Ketua Panitia seminar Zaini Munawir menuturkan, kegiatan ilmiah ini tak hanya bermanfaat bagi dosen. Melainkan, juga bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikuti.

"Mahasiswa yang mengikuti seminar ini tak hanya dari FH UMA sendiri, tetapi juga ada sekitar 11 perguruan tinggi di Medan," tutur Zaini.●

No. Form : FM-HPT-01-01
Rev: 00
Tgl Eff. 01 Des 2012

Sumut Pos
JUMAT, 24 NOVEMBER 2017



Selamat dan Sukses

SEMINAR NASIONAL

"PROBLEMATIKA HUKUM DI INDONESIA"
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

23 November 2017 | Convention Hall UMA

DIABADIKAN: Dekan Fakultas Hukum UMA, Dr Utari Maharani Barus SH MHum (tengah) diabadikan bersama dengan narasumber, pada seminar nasional Problematika Hukum di Indonesia' di gedung serbaguna Kampus Utama Jalan Kolam, Medan Estate, Kamis (23/11).

Seminar Problematika Hukum di Indonesia

Akademisi Rekomendasi Perbaiki Hukum

MEDAN-Fakultas Hukum (FH) Universitas Medan Area (UMA) menggelar seminar nasional bertajuk 'Problematika Hukum di Indonesia' yang berlangsung di gedung serbaguna Kampus Utama Jalan Kolam, Medan Estate, Kamis (23/11).

Seminar yang menghadirkan narasumber dari berbagai universitas di Indonesia ini, digelar dalam rangka membahas dan memberi rekomendasi untuk perbaikan hukum di tanah air.

Dekan FH UMA, Dr Utari Maharani Barus SH

Para narasumber mempresentasikan hasil risetnya tentang persepektif hukum yang berbeda-beda. Mulai dari hukum pidana (pencabulan), perdata, perceraian, pertanahan, bisnis atau persainan usaha, administrasi hingga tata negara.

"Seminar ini terselenggara berkat kerja sama dengan kelompok atau dosen muda dari FH USU yang melakukan penelitian. Dan, dipadukan dengan dosen FH UMA serta beberapa peneliti di bidang hukum dari tiga universitas lainnya di luar Sumut. Oleh karenanya, dari perspektif hukum yang ber-

persoalan hukum di Indonesia saat ini. Rekomendasi tersebut nantinya disampaikan kepada pemerintah atau lembaga terkait, dalam rangka perubahan atau perbaikan hukum di negeri ini.

"Seminar ini sangat bagus dan juga salah satu program kerja kami, yaitu berupaya untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi dosen. Tak hanya itu, berdampak terhadap akreditasi di FH UMA ke depannya," jelas Utari.

Sementara, Ketua Panitia seminar tersebut, Zaini Munawir SH MHum menuturkan kegiatan ilmiah



Analisa/taufik wal hidayat

PAPARKAN: Direktur Pengembangan Teknologi dan Industri Kemenristek Dikti, Dr Eng Hotmatua Daulay M.Eng B.Eng memaparkan sosialisasi Program Penelitian PPTI dan Insinas 2018, baru-baru ini di Convention Hall Kampus UMA Jalan Kolam Medan Estate.

Sosialisasi Insinas dan PPTI di UMA Penelitian Dosen Belum Libatkan Industri

Medan, (Analisa)

Direktur Pengembangan Teknologi dan Industri Kemenristek Dikti, Dr Eng Hotmatua Daulay M.Eng B.Eng mengungkapkan penelitian yang dilakukan dosen di Indonesia berjalan sendiri dan tidak melibatkan dunia industri.

"Kebanyakan penelitian kita tidak ada mitra industrinya dan masing-masing dilakukan sendiri. Padahal, ketika mengajukan proposal penelitian dan industri dilibatkan maka hasil penelitian bisa diintegrasikan ke industri," kata Hotmatua^a pada sosialisasi Program Penelitian Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI) dan Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas) 2018, di Convention Hall kampus UMA Jalan Kolam Medan Estate, baru-baru ini.

Sosialisasi digelar atas kerja sama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UMA dan Direktorat Pengembangan Teknologi dan Industri Kemenristek Dikti.

Turut hadir Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Heri Kusmanto MA, Ketua LP2M UMA, Dr Suswati MP, dan Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawati MP.

Lebih lanjut Hotmatua menerangkan hasil riset bisa dimasukkan ke dunia industri, sehingga bermanfaat untuk akademik dan industri. Namun sayangnya, pola pikir penelitian dosen belum terintegrasi.

Dia mencontohkan, kesalahan dari pola pikir penelitian itu seperti sekelompok orang yang ingin membuat mobil. "Ada yang bertugas membuat ban, *body*, mesinnya. Namun begitu dirangkai mobilnya tidak jadi karena ternyata bannya, *body* dan mesin ukurannya berbeda dan bentuknya jadi aneh. Begitulah kalau penelitian tidak terintegrasi dan berdiri sendiri," tuturnya.

Untuk itu dia meminta kepada dosen UMA sebelum membuat penelitian dasar, harus diketahui dulu apa yang arahnya dan ujung penelitian itu. Kuncinya, kata dia, ada dalam tahapan teoritis, terapan dan pengembangan.

Akui

Hotmatua mengakui, di UMA banyak fakultas dan program studi unggulan. Menurutnya, jika unggulan dari universitas ditetapkan dan disenergikan maka akan bisa ditemukan hal yang baru.

Kebanyakan perguruan tinggi bingung menentukan hasil penelitian dan arahnya tak jelas. Akibatnya, hasil penelitian itu pun tidak akan kelihatan padahal sudah banyak makan biaya

Pada sosialisasi itu, Hotmatua juga menyebutkan perubahan Insinas 2018 dibanding sebelumnya. "Kalau dulu temanya dilepas begitu saja, namun sekarang ditentukan," ujarnya seraya menyebutkan enam tema khusus Insinas 2018

Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Heri Kusmanto MA saat membuka sosialisasi itu menyatakan saat ini UMA gencar dalam penguatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Untuk itu dia menilai sosialisasi tersebut penting dan besar manfaatnya sehingga **Published 4/19** UMA bisa membuat proposal sebanyak mungkin. "Dengan proposal yang banyak tentu akan meningkatkan jumlah penelitian," kata Kusmanto.

HARIAN

REALITAS

Rabu, 29 Nopember 2017

Sosialisasi Insinas dan PPTI

UMA Dorong Hasil Riset Dosen Terintegrasi ke Industri

Medan, Realitas

Direktur Pengembangan Teknologi dan Industri Kemenristek Dikti, Dr Eng Hotmatua Daulay M.Eng B.Eng mengungkapkan penelitian dilakukan oleh dosen di Indonesia berjalan masing-masing sendiri dan tidak melibatkan dunia industri.

"Kebanyakan penelitian kita tidak ada mitra industrinya dan dilakukan masing-masing sendiri. Padahal, ketika mengajukan proposal penelitian dan industri dilibatkan maka hasil dari penelitian atau riset itu bisa diintegrasikan ke industri," kata Hotmatua pada sosialisasi program penelitian PPTI dan Insinas 2018, di Convention Hall kampus Universitas Medan Area (UMA)-Jalan Kolan-Medan Estate, Selasa (28/11).

Dalam sosialisasi PPTI (Program Pengembangan Teknologi Industri) dan Insinas (Insentif riset sistem inovasi nasional) 2018 itu, Hotmatua memaparkan Hilirisasi Penelitian dan Program Intensif Riset dan Pengembangan.

Sosialisasi digelar atas kerjasama LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UMA dan Direktorat Pengembangan Teknologi dan Industri Kemenristek Dikti.

Hadir pada sosialisasi itu Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Heri Kusmanto MA, Ketua LP2M UMA, Dr Suswati MP, dan Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawati MP.

Menurut Hotmatua, hasil riset bisa dimasukkan ke industri. Jadi, kata dia, riset itu tidak hanya selesai begitu saja.

"Bagaimana meramu hasil pene-

dari pola pikir penelitian itu seperti sekelompok orang yang ingin membuat mobil. "Ada yang bertugas membuat ban, body, mesinnya. Namun begitu dirangkai mobilnya tidak jadi karena ternyata bumper, ban, bodi dan mesin ukurannya berbeda dan bentuknya jadi aneh. Begitulah kalau penelitian tidak terintegrasi dan berdiri sendiri," tuturnya.

Untuk itu dia meminta kepada dosen UMA sebelum membuat penelitian dasar, harus diketahui dulu apa yang arahnya di ujung penelitian itu. Kuncinya, kata dia, ada dalam tahapan teoritis, terapan dan pengembangan.

Hotmatua mengakui, di UMA banyak fakultas dan program studi unggulan. Menurutnya, jika unggulan dari universitas ditetapkan dan disenergikan maka akan bisa ditemykan hal yang baru. Dia meminta UMA mengetahui penelitian apa yang dibutuhkan. Ini lantaran perguruan tinggi banyak SDM, banyak penelitiannya tapi belum tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan

kan untuk hasil penelitiannya.

"Kebanyakan perguruan tinggi bingung menentukan hasil penelitian dan arahnya tak jelas. Akibatnya, hasil penelitian itu pun tidak akan kelihatan padahal sudah banyak makan biaya," ucapnya.

Pada sosialisasi itu, Hotmatua menyebutkan perubahan Insinas 2018 dibanding sebelumnya.

"Kalau dulu temanya dilepas begitu saja, namun sekarang ditentukan," ujarnya.

Disebutkannya, tema khusus Insinas 2018 ada 6, yakni pengembangan pangan fungsional berbasis sumberdaya lokal dengan instansi leader dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pengembangan iptek penerbangan dan antariksa untuk pemantauan sumber daya alam dan lingkungan dengan instansi leader Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Pengembangan desain rinci tabung awal Reaktor Daya Eksperimental (RDE) dengan instansi leader Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Pengembangan

energi baru terbarukan berbasis Bioenergi dengan instansi leader Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pengembangan sistem dan teknologi pengawasan instalasi dan fasilitas nuklir dengan instansi leader Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Pengembangan SNI untuk mendukung hasil litbang kesehatan, pangan, dan energi nuklir, panas bumi, pemantauan dan sumber daya alam dengan instansi leader Badan Standarisasi Nasional.

Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Heri Kusmanto MA ketika membuka sosialisasi itu menyatakan saat ini UMA gencar dalam penguatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk itu, dia menilai sosialisasi tersebut penting dan besar manfaatnya sehingga para peneliti di UMA bisa membuat proposal sebanyak mungkin.

"Dengan proposal yang banyak tentu akan meningkatkan jumlah penelitian," kata Kusmanto.

Sedangkan Ketua LP2M UMA Dr Suswati MP dalam sambutannya menyatakan apresiasi atas kunjungan Direktur Pengembangan Teknologi dan Industri Kemenristek Dikti, Dr Eng Hotmatua Daulay ke UMA melakukan sosialisasi.

Menurutnya sosialisasi itu menjadi tantangan bagi dosen UMA untuk mengajukan proposal penelitian.

"Ini peluang besar bagi dosen peneliti untuk menghilirisasi hasil penelitian, terapan yang telah dilakukan," ujarnya.

Disebutkannya, hasil penelitian terapan itu dananya bersumber dari



Berita Sore
Selasa
 5 Desember 2017

UMA Dorong Hasil Riset Dosen Terintegrasi ke Industri

MEDAN (Berita): Direktur Pengembangan Teknologi dan Industri Kemenristek Dikti, Dr Eng Hotmatua Daulay M.Eng B.Eng mengungkapkan penelitian dilakukan oleh dosen di Indonesia berjalan masing-masing sendiri dan tidak melibatkan dunia industri.

"Kebanyakan penelitian kita tidak ada mitra industrinya dan dilakukan masing-masing sendiri. Padahal, ketika mengajukan proposal penelitian dan industri dilibatkan maka hasil dari penelitian atau riset itu bisa diintegrasikan ke industri," kata Hotmatua pada sosialisasi program penelitian PPTI dan Insinas 2018, di Convention Hall kampus Universitas Medan Area (UMA) Jalan Kolam Medan Estate, Selasa (28/11).

Dalam sosialisasi PPTI (Program Pengembangan Teknologi Industri) dan Insinas (Insentif riset sistem inovasi nasional) 2018 itu, Hotmatua memaparkan Hilirisasi Penelitian dan Program Intensif Riset dan Pengembangan.

Teknologi dan Industri Kemenristek Dikti.

Hadir pada sosialisasi itu Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Heri Kusmanto MA, Ketua LP2M UMA, Dr Suswati MP, dan Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawati MP.

Menurut Hotmatua, hasil riset bisa dimasukkan ke industri. Jadi, kata dia, riset itu tidak hanya selesai begitu saja.

"Bagaimana meramu hasil penelitian, itu juga perlu dipikirkan. Tapi hal itu sulit karena penelitian kita asyik pada bidangnya masing-masing, tidak terintegrasi," ujarnya.

Dia mencontohkan, kesalahan dari pola pikir penelitian itu seperti sekelompok orang yang ingin membuat mobil. "Ada yang bertugas membuat ban, body, mesinnya. Namun begitu dirangkai mobilnya tidak jadi karena ternyata bampor, ban, bodi dan mesin ukurannya berbeda dan bentuknya jadi aneh. Begitulah kalau penelitian tidak terintegrasi dan berdiri sendiri," tuturnya.

Untuk itu dia meminta

itu. Kuncinya, kata dia, ada dalam tahapan teoritis, terapan dan pengembangan.

Hotmatua mengakui, di UMA banyak fakultas dan program studi unggulan. Menurutnya, jika unggulan dari universitas ditetapkan dan disenergikan maka akan bisa ditemykan hal yang baru. Dia meminta UMA mengetahui penelitian apa yang dibutuhkan. Ini lantaran perguruan tinggi banyak SDM, banyak penelitiannya tapi belum tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk hasil penelitiannya.

"Kebanyakan perguruan tinggi bingung menentukan hasil penelitian dan arahnya tak jelas. Akibatnya, hasil penelitian itu pun tidak akan kelihatan padahal sudah banyak makan biaya," ucapnya.

Pada sosialisasi itu, Hotmatua menyebutkan perubahan Insinas 2018 dibanding sebelumnya.

"Kalau dulu temanya dilepas begitu saja, namun sekarang ditentukan," ujarnya seraya menyebutkan tema khusus Insinas 2018 ada 6,

gencar dalam penguatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk itu dia menilai sosialisasi tersebut penting dan besar manfaatnya sehingga para peneliti di UMA bisa membuat proposal sebanyak mungkin.

"Dengan proposal yang banyak tentu akan meningkatkan jumlah penelitian," kata Kusmanto.

Sedangkan Ketua LP2M UMA Dr Suswati MP dalam sambutannya menyatakan apresiasi atas kunjungan Direktur Pengembangan Teknologi dan Industri Kemenristek Dikti, Dr Eng Hotmatua Daulay ke UMA melakukan sosialisasi.

Menurutnya sosialisasi itu menjadi tantangan bagi dosen UMA untuk mengajukan proposal penelitian.

"Ini peluang besar bagi dosen peneliti untuk menghilirisasi hasil penelitian terapan yang telah dilakukan," ujarnya.

Disebutkannya, hasil penelitian terapan itu dananya bersumber dari Direktorat Pengembangan Teknologi dan Industri Kemenristek Dikti.

A Dorong Hasil Riset Dosen Integrasi ke Industri

...sua
...mbangan Teknologi
...menristek Dikti, Dr
...aulay MEng BEng
...nelitian dilakukan
...a berjalan masing-
...n tidak melibatkan

...nelitian kita
...industrinya dan
...g-masing sendiri.
...ngajukan proposal
...ndustri dilibatkan
...nelitian atau riset itu
...n ke industri," kata
...in pada sosialisasi
...n PPTI dan Insinas
...tion Hall kampus
...n Area (UMA) Jalan

...e.
...asi PPTI (Program
...teknologi Industri)
...entif riset sistem
...2018 itu, Hotmatua
...irisasi Penelitian
...ntensif Riset dan

...lar atas kerjasama
...a Penelitian dan
...arakat) UMA dan
...mbangan Teknologi
...nristek Dikti.

...sialisasi itu Wakil
...akademik Dr Heri
...tua LP2M UMA, Dr
...abag Humas UMA
...i MP.

...atua, hasil riset bisa
...ndustri. Jadi, kata dia,
...aselesai begitu saja.

"Bagaimana meramu hasil penelitian, itu juga perlu dipikirkan. Tapi hal itu sulit karena penelitian kita asyik pada bidangnya masing-masing, tidak terintegrasi," ujarnya.

Untuk itu dia meminta kepada dosen UMA sebelum membuat penelitian dasar, harus diketahui dulu apa yang arahnya di ujung penelitian itu. Kuncinya, kata dia, ada dalam tahapan teoritis, terapan dan pengembangan.

Disebutkannya, tema khusus Insinas 2018 ada 6, yakni pengembangan pangan fungsional berbasis sumberdaya lokal dengan instansi leader dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pengembangan iptek penerbangan dan antariksa untuk pemantauan sumber daya alam dan lingkungan dengan instansi leader Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Pengembangan desain rinci tahap awal Reaktor Daya Eksperimental (RDE) dengan instansi leader Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Pengembangan energi baru terbarukan berbasis Bioenergi dengan instansi leader Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pengembangan sistem dan teknologi pengawasan instalasi dan fasilitas nuklir dengan instansi leader Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Pengembangan SNI untuk mendukung hasil litbang kesehatan, pangan, dan energi nuklir, panas



Jurnal Asia | swisma

PAPARAN. Direktur Pengembangan Teknologi dan Industri Kemenristek Dikti, Dr Eng Hotmatua Dauly MEng BEng memberikan paparan pada sosialisasi program penelitian PPTI dan Insinas 2018 di kampus UMA.

bumi, pemantauan dan sumber daya alam dengan instansi leader Badan Standarisasi Nasional.

Wakil Rektor Bidang Akademik Dr Heri Kusmanto MAketika membuka sosialisasi itu menyatakan saat ini UMA gencar dalam penguatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Untuk itu dia menilai sosialisasi tersebut penting dan besar manfaatnya sehingga para peneliti di UMA bisa membuat proposal

sebanyak mungkin.

"Dengan proposal yang banyak tentu akan meningkatkan jumlah penelitian," kata Kusmanto.

Sedangkan Ketua LP2M UMA Dr Suswati MP dalam sambutannya menyatakan apresiasi ataskunjungan Direktur Pengembangan Teknologi dan Industri Kemenristek Dikti, Dr Eng Hotmatua Dauly ke UMA melakukan sosialisasi.

Menurutnya sosialisasi itu menjadi tantangan bagi dosen

UMA untuk mengajukan proposal penelitian. "Ini peluang besar bagi dosen peneliti untuk menghilirisasi hasil penelitian terapan yang telah dilakukan," ujarnya.

Disebutkannya, hasil penelitian terapan itu dananya bersumber dari Direktorat Pengembangan Teknologi dan Industri Kemenristek Dikti. Selama ini, kata Suswati, sumber dana berasal dari Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat

(swisma)

No. Form : FM-HPT-01-01
Rev : 00
Tgl Eff. 01 Des 2012

HARIAN andalas

Senin

20 November 2017

Hal 4

PROF HAMDAN ZOELVA DI UMA

Penegakan Hukum Belum Lepas dari Intervensi Politik

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Hamdan Zoelva SH MH menilai, penegakan hukum di Indonesia masih belum lepas dari intervensi politik. Intervensi tidak hanya pada pembentukan produk hukum, namun juga pada proses pelaksanaannya di lembaga peradilan.

"Selain pengaruh politik, budaya, dan ekonomi juga masih kuat mengganggu penegakan hukum secara adil," kata Prof Hamdan Zoelva ketika memberikan kuliah umum di Kampus Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area (UMA), Jalan Setiabudi/Sei Serayu Medan, Jumat (18/11) malam.

Kuliah umum bertajuk "Penegakan Hukum Antara Cita-cita Realita" itu dibuka Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UMA Prof Ir H Zulkarnain Lubis MS PhD, dihadiri Dekan Fakultas Hukum UMA Dr/Utary Maharani Barus MH, pimpinan PPs UMA, Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawaty MP,



Mantan Ketua MK Prof Hamdan Zoelva (kiri) diabadikan bersama WR IV UMA Prof Zulkarnain Lubis.

mahasiswa S1 dan S2 UMA.

Lebih lanjut Hamdan Zoelva menegaskan, meski Indonesia sudah lepas dari era pemerintahan otoriter, namun intervensi politik, ekonomi, dan budaya masih belum dapat dilepaskan. Tentu hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum.

"Independensi penegakan hukum di negeri ini masih dipengaruhi faktor sosial politik, ekonomi, dan budaya. Bahkan, transaksi politik masih kental memengaruhi hukum di Indonesia," sebut Zoelva

lepas dari intervensi politik. Seharusnya, Setnov selaku Ketua DPR memberikan contoh kepada rakyat bagaimana menghormati hukum. Bukan sebaliknya terkesan mempermainkan hukum.

"Drama Setnov seakan ini membangun opini publik, betapa sulitnya menerapkan hukum kepada pejabat tinggi negara, sebaliknya kepada rakyat kecil sangat mudah," ucapnya.

Sementara, Wakil Rektor IV UMA Prof Zulkarnain Lubis mengapresiasi kehadiran Prof Hamdan Zoelva berbagi ilmu dengan para mahasiswa UMA. Pencerahan tentang ilmu hukum yang disampaikan narasumber sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam memahami hukum.

"Kehadiran mantan ketua MK dan sejumlah tokoh nasional maupun internasional ke UMA, merupakan bagian dari upaya UMA meningkatkan kualitas mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Karena itu, UMA akan terus menghadirkan orang-orang hebat, di samping terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas UMA," katanya. (HAM)

WASPADA

WASPADA

Senin
14 November 2016

B12



Waspada/ist

REKTOR Bid. Administrasi dan Keuangan Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana (kanan), memberikan cenderamata kepada Prof. Ishak Ubit dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Fak. Pertanian UMA- UKM Jalin Kerjasama

MEDAN (Waspada): Fakultas pertanian Universitas Medan Area Menggelar Kuliah umum tentang Development of Cellulose Nanno Crystals (CNC) and Its Applications yang disampaikan oleh Prof. Ishak Ubit dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Kamis, (10/11) di Convention Hall Kampus I UMA.

Kuliah umum ini merupakan implementasi kerjasama UMA dan UKM yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan penandatanganan Kesepakatan tersebut telah dilakukan oleh rektor UMA dan pihak dari UKM pada 20 November 2015.

Hal tersebut disampaikan oleh Bidang Wakil Rektor Bid. Administrasi dan Keuangan Dr. Ir. Hj. Siti Mardiana, Msi saat memberikan sambutan sekaligus kuliah umum dihadapan ratusan mahasiswa yang menjadi peserta kuliah umum. Selain itu, beliau juga berpesan kepada peserta agar mengikut kuliah umum dengan sungguh-sungguh dengan membawa ilmu yang disampaikan dan mudah-mudahan dapat diimplementasikan dimasa yang akan datang untuk kemaslahatan masyarakat luas.

Prof Ishak Ubit dalam kuliah umumnya mengungkapkan Nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala ato mik dan skala molekular. Aplikasi lainnya seperti bola tenis yang bisa bertahan lebih lama, bola golf yang bisa terbang lurus, dan bola bowling yang bisa lebih tahan dan permukaannya lebih keras. Celana panjang dan kaus kaki juga telah dimasukkan nanoteknologi sehingga bisa bertahan lebih lama dan tetap dingin pada musim panas. Dimengungkapkan Nanoteknologi juga memainkan peranan penting dalam pengembangan rekayasa jaringan. Ketika mendesain scaffold, ilmuwan mencoba meniru karakteristik skala nano dari suatu sel. Contohnya, ketika membuat scaffold untuk menopang pertumbuhan

HARIAN

REALITAS

Rabu, 16 Nopember 2016

3

Prof. Ishak Ubit dari UKM Kuliah Umum di Faperta UMA

Medan, Realitas

Fakulta's Pertanian Universitas Medan Area (Faperta UMA) menghadirkan pakar Nanoteknologi Prof Ishak Ubit dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada acara kuliah umum di Convation Hall Kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate, Kamis (10/11).

Prof Ishak Ubit memaparkan tentang "Development of Cellulose Nanno Crystals (CNC) and It's Applications".

Rektor UMA diwakili Wakil Rektor II, Dr Hj Siti Mardiana MSi dalam sambutannya mengatakan UMA mengapresiasi kehadiran Prof Ishak Ubit membeirkan kuliah umum kepada mahasiswa dan dosen FT UMA.

Sebab Prof Ishak merupakan salah satu dosen terbaik di Malaysia yang menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Malaysia atas temuan dari perkembangan CNC.

"Terima kasih kepada Prof Ishak Ubit yang juga merupakan Wakil Rektor Pascasarjana S2 dan S3 di UKM yang bersedia datang

umum ini merupakan lanjutan program kerja sama kedua kampus setelah sebelumnya mahasiswa UMA berkunjung ke UKM dalam rangka studi banding.

Kuliah umum dipandu Ir Erwin Pane MS itu, Prof Ishak menjelaskan nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekular. Diameter atom berkisar antara 62 pikometer (atom Helium) sampai 520 pikometer (atom Cesium). Sedangkan kombinasi dari beberapa atom membentuk molekul dengan kisaran ukuran nano.

Deskripsi awal dari nanoteknologi mengacu pada tujuan penggunaan teknologi untuk memanipulasi atom dan molekul untuk membuat produk berskala makro.

Deskripsi yang lebih umum adalah manipulasi materi dengan ukuran maksimum 100 nanometer.

Agustus 2008, nano teknologi ada 800 produk. Sebagian besar aplikasi terbatas pada penggunaan nanomaterial pasif "generasi pertama" di antaranya termasuk titanium dioksida pada tabir surya, kosmetik, pelapis per-

atan rumah tangga, seng oksida pada tabir surya dan kosmetik, pelapis permukaan, cat, dan pernis furnitur; dan serium oksida sebagai katalis bahan bakar.

Aplikasi lainnya seperti bola tenis yang bisa bertahan lebih lama, bola golf yang bisa terbang lurus, dan bola bowling yang bisa lebih tahan dan permukaannya lebih keras.

Celana panjang dan kaus kaki juga telah dimasukkan nanoteknologi sehingga bisa bertahan lebih lama dan tetap dingin pada musim panas. Bandage diinfus dengan nano perak untuk menyembuhkan luka lebih cepat dan banyak lagi.

Ilmuwan saat ini, katanya sedang mengembangkan nanoteknologi untuk mesin diesel dengan gas buang lebih bersih. Platina saat ini digunakan sebagai katalis pada mesin diesel.

Dia juga mengungkapkan nanoteknologi juga memainkan peranan penting dalam pengembangan teknologi berbagai bidang seperti di bidang kesehatan, pertanian, teknik dan biologi.

Turut hadir di antaranya

HARIAN**Analisa**

13 November 2016

24

UMA Hadirkan Prof Ishak Ubit Nanoteknologi Sedang Dikembangkan untuk Mesin Diesel

Medan, (Analisa)

Fakultas Pertanian Universitas Medan Area (Faperta UMA) menghadirkan pakar Nanoteknologi Prof Ishak Ubit dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada acara kuliah umum di Convention Hall Kampus IUMA Jalan Kolam Medan Estate, Kamis (10/11).

Rektor UMA diwakili Wakil Rektor II, Dr Hj Siti Mardiana MSi dalam sambutannya mengatakan UMA mengapresiasi kehadiran Prof Ishak Ubit memberikan kuliah umum kepada mahasiswa dan dosen FT UMA. Sebab Ishak merupakan salah satu dosen terbaik di Malaysia yang menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Malaysia atas temuan dari perkembangan CNC.

"Terima kasih kepada Prof Ishak Ubit yang juga merupakan Wakil Rektor Pascasarjana S2 dan S3 di UKM yang bersedia datang ke UMA dalam lanjutan kerjasama yang telah ditandatangani 20 November 2015 lalu di Jakarta," kata Dr Siti Mardiana.

Siti Mardiana mengungkapkan, kuliah umum itu merupakan lanjutan program kerja sama kedua kampus setelah sebelumnya mahasiswa UMA berkunjung ke UKM dalam rangka studi banding.

Pada kuliah umum dipandu Ir Erwin Pane MS itu, Prof Ishak Ubit memaparkan tentang "Development of Cellulose Nano Crystals (CNC) and It's Applications". Nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekular. Diameter atom berkisar antara 62 pikometer (atom Helium) sampai 520 pikometer (atom Cesium). Sedangkan kombinasi dari beberapa atom membentuk molekul dengan kisaran ukuran nano.

Deskripsi awal dari nanoteknologi mengacu pada tujuan penggunaan teknologi untuk memanipulasi atom dan molekul

untuk membuat produk berskala makro. Deskripsi yang lebih umum adalah manipulasi materi dengan ukuran maksimum 100 nanometer.

Agustus 2008, nano teknologi ada 800 produk. Sebagian besar aplikasi terbatas pada penggunaan nanomaterial pasif "generasi pertama" di antaranya termasuk titanium dioksida pada tabir surya, kosmetik, pelapis permukaan, dan beberapa produk makanan; alotrop karbon yang digunakan pada gecko tape; perak.

Selain itu digunakan pada pengemasan makanan, pakaian, desinfektan, dan peralatan rumah tangga, seng oksida pada tabir surya dan kosmetik, pelapis permukaan, cat, dan pernis furnitur; dan serum oksida sebagai katalis bahan bakar.

Aplikasi lainnya seperti bola tenis yang bisa bertahan lebih lama, bola golf yang bisa terbang lurus, dan bola bowling yang bisa lebih tahan dan permukaannya lebih keras.

Celana panjang dan kaus kaki juga telah dimasukkan nanoteknologi sehingga bisa bertahan lebih lama dan tetap dingin pada musim panas. Bandage diinfus dengan nano perak untuk menyembuhkan luka lebih cepat dan banyak lagi. Ilmuwan saat ini, katanya sedang mengembangkan nanoteknologi untuk mesin diesel dengan gas buang lebih bersih. Platina saat ini digunakan sebagai katalis pada mesin diesel.

Dia juga mengungkapkan nanoteknologi juga memainkan peranan penting dalam pengembangan teknologi berbagai bidang seperti di bidang kesehatan, pertanian, teknik dan biologi.

Turut hadir di antaranya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UMA, Ir H Zulhery Noer MP, Kabag Humas UMA, Ir Asmah Indrawati MP dan Wakil Dekan III Faperta UMA, Ir Gustami Harahap MP. (twh)



Medan **Bisnis**

UNIVERSITAS
VII

Selasa, 15 November 2016

Faperta UMA Kuliah Umum Nanoteknologi

■ zahendra/rii

MedanBisnis - Medan

Fakultas Pertanian Universitas Medan Area (Faperta UMA) menghadirkan pakar Nanoteknologi Prof Ishak Ubit dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) pada acara kuliah umum di Convetion Hall Kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate, Kamis (10/11).

Prof Ishak Ubit memaparkan tentang "Development of Cellulose Nanno Crystals (CNC) and It's Applications".

Rektor UMA diwakili Wakil Rektor II Dr Hj Siti Mardiana MSi dalam sambutannya mengatakan UMA mengapresiasi kehadiran Prof Ishak Ubit membeirkan kuliah umum kepada mahasiswa dan dosen FT UMA.

Sebab Prof Ishak merupakan salahsatu dosen terbaik di Malaysia yang menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Malaysia atas temuan dari perkembangan CNC.

"Terima kasih kepada Prof Ishak Ubit yang juga merupakan Wakil Rektor Pascasarjana S2 dan S3 di UKM yang bersedia datang ke UMA dalam lanjutan kerjasama yang telah ditan-datangani 20 November 2015 lalu di Jakarta," kata Dr Siti Mardiana.

Dr Siti Mardina mengungkapkan, kegiatan kuliah umum ini merupakan lanjutan program kerja sama kedua kampus setelah sebelumnya mahasiswa UMA berkunjung ke UKM dalam rangka studi banding.

Prof Ishak menjelaskan Nano-

teknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekular. Diameter atom berkisar antara 62 pikometer (atom Helium) sampai 520 pikometer (atom Cesium). Sedangkan kombinasi dari beberapa atom membentuk molekul dengan kisaran ukuran nano.

Deskripsi awal dari Nanoteknologi mengacu pada tujuan penggunaan teknologi untuk memanipulasi atom dan molekul untuk membuat produk berskala makro.

Deskripsi yang lebih umum adalah manipulasi materi dengan ukuran maksimum 100 nanometer. Agustus 2008, Nanoteknologi ada 800 produk. Sebagian besar aplikasi terbatas pada penggunaan nanomaterial pasif "generasi pertama" di antaranya

termasuk titanium dioksida pada tabir surya, kosmetik, pelapis permukaan, dan beberapa produk makanan, alotrop karbon yang digunakan pada gecko tape perak.

Selain itu digunakan pada pengemasan makanan, pakaian, desinfektan, dan peralatan rumah tangga, seng oksida pada tabir surya dan kosmetik, pelapis permukaan, cat, dan pernis furnitur; dan serium oksida sebagai katalis bahan bakar.

"Aplikasi lainnya seperti bola tenis yang bisa bertahan lebih lama, bola golf yang bisa terbang lurus, dan bola bowling yang bisa lebih tahan dan permukaannya lebih keras," kata Prof Ishak Ubit pada kuliah umum tersebut dipandu Ir Erwin Pane MS.

Prof Ishak Ubit Kuliah Umum di UMA

Keha- bisa bersama-sama mende- ngarkan temuan terbaru dari Medan Prof Ishak Ubit dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) tentang Cellulose Nanno Crystals (CNC) dan cara mengaplikasikannya. Demikian disampaikan



hkan cendemata kepada Rektor UMA Prof Dr HA Ya'kub Matondang

Wakil Rektor II UMA Dr Ir Siti Mardiana MSi mewakili Rektor dalam sambutannya pada acara pembukaan kuliah umum Development Of Cellulose Nanno Crystals (CNC) and It's Application di Convention Hall UMA, Kamis (10/11).

Dalam kesempatan tersebut dia mengucapkan terima kasih kepada Prof Ishak Ubit yang juga merupakan Wakil Rektor Pasca Sarjana S2 dan S3 di UKM yang telah bersedia datang ke UMA dalam lanjutan kerjasama yang telah ditandatangani 20 Nopember 2015 lalu di Jakarta.

"Kegiatan kuliah umum merupakan lanjutan program kerjasama kedua kampus setelah sebelumnya mahasiswa UMA melakukan kunjungan ke UKM dalam rangka studi banding," ujarnya.

Selanjutnya dia berharap ilmu yang disampaikan dapat diserap oleh para dosen dan mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini selanjutnya dapat dikembangkan dalam peningkatan ilmu dan teknologi di Kampus UMA.

Prof Ishak Ubit dalam kuliah umumnya mengungkapkan Nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekular. Diameter atom berkisar antara 62 pikometer (atom Helium) sampai 520 pikometer (atom Cesium), sedangkan kombinasi dari beberapa atom membentuk molekul dengan kisaran ukuran nano. Deskripsi awal dari nanoteknologi mengacu pada tujuan penggunaan teknologi untuk memanipulasi atom dan molekul untuk membuat produk berskala makro. Deskripsi yang lebih umum adalah manipulasi materi dengan ukuran maksimum 100 nanometer.

Per Agustus 2008, Project on Emerging Nanotechnologies memperkirakan ada sekitar 800 produk nanoteknologi yang tersedia secara umum, dengan 1 produk baru muncul tiap 3-4 minggu. Sebagian besar aplikasi terbatas pada penggunaan nanomaterial pasif "generasi pertama" yang diantaranya termasuk titanium dioksida pada tabir surya, kosmetik, pelapis permukaan,

dan beberapa produk makanan; alotrop karbon yang digunakan pada gecko tape; perak pada pengemasan makanan, pakaian, desinfektan, dan peralatan rumah tangga, seng oksida pada tabir surya dan kosmetik, pelapis permukaan, cat, dan pernis furnitur; dan serium oksida sebagai katalis bahan bakar.

Aplikasi lainnya seperti bola tenis yang bisa bertahan lebih lama, bola golf yang bisa terbang lurus, dan bola bowling yang bisa lebih tahan dan permukaannya lebih keras. Celana panjang dan kaus kaki juga telah dimasukkan nanoteknologi sehingga bisa bertahan lebih lama dan tetap dingin pada musim panas. Bandage diinfus dengan nano perak untuk menyembuhkan luka lebih cepat. Konsol permainan video dan komputer pribadi lebih murah, cepat, dan memori lebih tinggi berkat nanoteknologi. Nanoteknologi memungkinkan peralatan medis yang ada saat ini menjadi lebih murah dan mudah digunakan. Mobil dibuat dengan

nanomaterial sehingga logam lebih sedikit dan bakar lebih hemat di depan.

Ilmuwan saat ini sedang mengembangkan nanotologi untuk mesin diesel dengan gas buang lebih bersih. Pada saat ini digunakan sebagai katalis pada mesin diesel. Katalis tereduksi akan mengatom nitrogen dari molekul sehingga membebaskan oksigen. Kemudian katalis mengoksidasi hidrokarbon dan karbon monoksida menjadi karbon dioksida dan air. Platina digunakan pada katalis reduksi oksidasi. Namun, menggunakan platina tidak efisien karena mahal dan tidak terbarukan.

Di akhir pemaparannya mengungkapkan Nanoteknologi juga memainkan peran penting dalam pengembangan rekayasa jaringan. Ketum mendesain scaffold, ilmuwan mencoba meniru karakteristik skala nano dari suatu struktur. Contohnya, ketika membuat scaffold untuk menopang pertumbuhan tulang, ilmuwan dapat meniru osteoklas. (0

Mimbar Umum

SABTU, 12 NOPEMBER 2016

Halaman

2

No. Form : FM-HPT-01-01
Rev: 00
Tgl Eff. 01 Des 2012

WASPADA

WASPADA

Senin

20 November 2017

B5

Mantan Ketua MK Di UMA:

Penegakan Hukum Belum Lepas Dari Intervensi Politik

MEDAN (Waspada): Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Hamdan Zoelva mengatakan, penegakan hukum di Indonesia dinilai belum lepas dari intervensi politik. Intervensi tidak hanya pada pembentukan produk hukum, namun juga pada proses pelaksanaannya di lembaga peradilan.

"Selain pengaruh politik, budaya, dan ekonomi, juga masih kuat mengganggu penegakan hukum secara adil," kata Prof. Hamdan Zoelva ketika memberikan kuliah umum di Pascasarjana Universitas Medan Area (UMA), Jumat (18/11) malam.

Kuliah umum bertajuk: "Penegakan Hukum antara Cita dan Realita" dibuka Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UMA, Prof. H. Zulkarnain Lubis Ph.D didampingi Dekan Fakultas Hukum UMA, Dr. Utary Maharani Barus dan pimpinan pascasarjana UMA dan dihadiri Kabag Humas UMA, Asmah Indrawaty, mahasiswa S1 dan S2 UMA.

Lebih lanjut, Prof. Hamdan Zoelva menegaskan, meski Indonesia sudah lepas dari era pemerintahan otoriter, namun intervensi politik dan ekonomi

hukum di negeri ini masih dipengaruhi faktor, sosial politik, ekonomi, dan budaya," tegasnya. Transaksi politik masih kental mempengaruhi hukum di Indo-nesia. Dia mencontoh, kalau pembuatan produk hukum sudah rusak, maka penegakannya juga rusak.

Menurutnya, tidak jarang, produk hukum dihasilkan masih lebih mementingkan kepentingan dan kompromi politik dibandingkan rakyat. Hal ini dapat terlihat banyak produk hukum yang dihasilkan di DPR justru kemudian diujikan ke Mahkamah Konstitusi.

"Proses pembentukan UU memang tidak dapat dilepaskan dari transaksi politik. Namun yang terpenting juga adalah bagaimana agar proses pelaksanaan penegakan hukum di lembaga peradilan bisa menjadi mandiri," tegasnya. Disamping faktor di atas, kesejahteraan aparat penegak hukum juga mempengaruhi penegakan hukum.

Telah lazim diungkapkan bahwa hukum khususnya dalam bentuknya sebagai undang-undang merupakan produk politik, artinya ialah UU dibentuk sebagai hasil kompromi dari berbagai kekuatan sosial. Arti-

Dia mengatakan, kasus Setya Novanto salah satu bahwa penegakan hukum tidak lepas dari intervensi politik. Seharusnya, Setnov selaku ketua DPR memberikan contoh kepada rakyat bagaimana menghormati hukum. Bukan sebaliknya terkesan mempermainkan hukum." Drama Setnov seakan ini membangun opini publik, betapa sulitnya menerapkan hukum kepada pejabat tinggi negara, sebaliknya kepada rakyat kecil sangat mudah," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IV UMA, Prof. Zulkarnain Lubis, Ph.D mengapresiasi kehadiran Prof. Hamdan Zoelva berbagi ilmu dengan para mahasiswa UMA. Pencerahan tentang ilmu hukum yang disampaikan

narasumber sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam memahami hukum.

Kehadiran mantan ketua MK dan sejumlah tokoh nasional maupun internasional ke UMA, menurutnya, merupakan bagian dari upaya UMA meningkatkan kualitas mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

Karena itu, ia meminta mahasiswa dapat menyerap semua ilmu yang disampaikan Prof. Hamdan Zoelva. "UMA terus menghadirkan orang-orang hebat, disamping terus membangun kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas mutu UMA," katanya. (m49/I)



HARIAN

Analisa

Senin, 20 November 2017

Halaman 5



Analisa/istimewa

KULIAH UMUM: Mantan Ketua MK Prof Hamdan Zoelva (tiga kiri) didampingi WR IV UMA Prof Zulkarnain Lubis (dua kiri), dan Dekan Fakultas Hukum UMA Dr Utary Maharani Barus MH (kanan), saat menyampaikan kuliah umum di Kampus PPs UMA, Jumat (17/11) malam.

Prof Hamdan Zoelva:

Penegakan Hukum Belum Lepas dari Intervensi

Medan, (Analisa)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Dr Hamdan Zoelva SHMH, menilai penegakan hukum di Indonesia masih belum lepas dari intervensi politik.

Intervensi, katanya, tidak hanya pada pembentukan produk hukum, namun juga pada proses pelaksanaannya di lembaga peradilan.

Hal itu disampaikannya, ketika memberikan kuliah umum di Kampus Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area (UMA), Jalan Setiabudi/Sei Serayu Medan, Jumat (17/11) malam.

Kuliah umum bertema "Penegakan Hukum Antara Cita-cita Realita" itu dibuka Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UMA Prof Ir H Zulkarnain

Lubis MS PhD, dan dihadiri Dekan Fakultas Hukum UMA Dr Utary Maharani Barus MH, pimpinan PPs UMA, Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawaty MP, mahasiswa S1 dan S2 UMA.

"Selain pengaruh politik, budaya, dan ekonomi juga masih kuat mengganggu penegakan hukum secara adil," kata Prof Hamdan Zoelva

Lebih lanjut ditegaskannya, meski Indonesia sudah lepas dari era pemerintahan otoriter, tetapi intervensi politik, ekonomi, dan budaya masih belum dapat dilepaskan. Tentu hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum.

"Independensi penegakan hukum di negeri ini masih dipengaruhi faktor sosial,

politik, ekonomi, dan budaya. Bahkan, transaksi politik masih kental memengaruhi hukum di Indonesia," ungkap Zoelva.

Disebutkannya, jika pembuatan produk hukum sudah rusak, maka penegakannya juga rusak. Tidak jarang, produk hukum yang dihasilkan masih lebih mementingkan kepentingan dan kompromi politik dibandingkan rakyat.

Kasus Setnov

Hal ini dapat terlihat dari banyaknya produk hukum yang dihasilkan DPR justru kemudian diuji (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi.

Dia mengatakan, kasus Setya Novanto (Setnov) salah satu contoh penegakan hukum tidak lepas dari inter-

vensi politik. Seharusnya, Setnov selaku Ketua DPR memberikan contoh kepada rakyat bagaimana menghormati hukum. Bukan sebaliknya,

kum kepada pejabat tinggi negara, sebaliknya kepada rakyat kecil sangat mudah," ucapnya. Sementara itu, Wakil Rektor IV IUMA Prof Zulkarnain

hukum yang disampaikan narasumber sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam memahami hukum.

UMA meningkatkan kualitas mahasiswa. Published on 11/19 disiplin ilmu yang dipelajari.

Karena itu, UMA akan terus menghadirkan orang-

HARIAN REALITAS

Senin, 20 Nopember 2017

REALITAS 12

Prof Hamdan Zoelva: Penegakan Hukum Belum Lepas dari Intervensi Politik

Medan, Realitas

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Hamdan Zoelva SH MH menilai, penegakan hukum di Indonesia masih belum lepas dari intervensi politik. Intervensi tidak hanya pada pembentukan produk hukum, namun juga pada proses pelaksanaannya di lembaga peradilan.

"Selain pengaruh politik, budaya, dan ekonomi juga masih kuat mengganggu penegakan hukum secara adil," kata Prof Hamdan Zoelva ketika memberikan kuliah umum di Kampus Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area (UMA), Jalan Setia Budi/Sei Serayu Medan, Jumat (18/11) malam.

Kuliah umum bertajuk "Penegakan Hukum Antara Cita-cita Realita" itu dibuka Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UMA Prof Ir H

Zulkarnain Lubis MS PhD, dihadiri Dekan Fakultas Hukum UMA Dr Utary Maharani Barus MH, pimpinan PPs UMA, Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawaty MP, mahasiswa S1 dan S2 UMA.

Lebih lanjut Hamdan Zoelva menegaskan, meski Indonesia sudah lepas dari era pemerintahan otoriter, namun intervensi politik, ekonomi, dan budaya masih belum dapat dilepaskan. Tentu hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum.

"Independensi penegakan hukum di negeri ini masih dipengaruhi faktor sosial politik, ekonomi, dan budaya. Bahkan, transaksi politik masih kental mempengaruhi hukum di Indonesia," ungkap Zoelva seraya menambahkan, kalau pembuatan produk hukum sudah rusak, maka penegakannya juga rusak.

Menurutnya, tidak jarang, produk hukum yang dihasilkan masih lebih mementingkan kepentingan dan kompromi politik dibandingkan rakyat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya produk hukum yang dihasilkan DPR justru kemudian diuji (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Dia mengatakan, kasus Setya Novanto (Setnov) salah satu contoh bahwa penegakan hukum tidak lepas dari intervensi politik. Seharusnya, Setnov selaku Ketua DPR memberikan contoh kepada rakyat bagaimana menghormati hukum. Bukan sebaliknya terkesan mempermainkan hukum.

"Drama Setnov seakan ini membangun opini publik, betapa sulitnya menerapkan hukum kepada pejabat tinggi negara, sebaliknya kepada rakyat kecil sangat mudah," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor IV UMA Prof Zulkarnain Lubis mengapresiasi kehadiran Prof Hamdan Zoelva berbagi ilmu dengan para mahasiswa UMA. Pencerahan tentang ilmu hukum yang disampaikan narasumber sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam memahami hukum.

"Kehadiran mantan ketua MK dan sejumlah tokoh nasional maupun internasional ke UMA, merupakan bagian dari upaya UMA meningkatkan kualitas mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Karena itu, UMA akan



HARIAN andalas

Senin

20 November 2017

Hal.

4

PROF HAMDAN ZOELVA DI UMA:

Penegakan Hukum Belum Lepas dari Intervensi Politik

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Hamdan Zoelva SH MH menilai, penegakan hukum di Indonesia masih belum lepas dari intervensi politik. Intervensi tidak hanya pada pembentukan produk hukum, namun juga pada proses pelaksanaannya di lembaga peradilan.

"Selain pengaruh politik, budaya, dan ekonomi juga masih kuat mengganggu penegakan hukum secara adil," kata Prof Hamdan Zoelva ketika memberikan kuliah umum di Kampus Program Pascasarjana (PPs) Universitas Medan Area (UMA), Jalan Setiabudi/Sei Serayu Medar, Jumat (18/11) malam.

Kuliah umum bertajuk "Penegakan Hukum Antara Cita-cita Realita" itu dibuka Wakil Rektor Bidang Kerja Sama UMA Prof Ir H Zulkarnain Lubis MS PhD, dihadiri Dekan Fakultas Hukum UMA Dr Utary Maharani Barus MH, pimpinan PPs UMA, Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawaty MP,



Mantan Ketua MK Prof Hamdan Zoelva (kiri) diabadikan bersama WR IV UMA Prof Zulkarnain Lubis.

mahasiswa S1 dan S2 UMA.

Lebih lanjut Hamdan Zoelva menegaskan, meski Indonesia sudah lepas dari era pemerintahan otoriter, namun intervensi politik, ekonomi, dan budaya masih belum dapat dilepaskan. Tentu hal ini akan mempengaruhi penegakan hukum.

"Independensi penegakan hukum di negeri ini masih dipengaruhi faktor sosial politik, ekonomi, dan budaya. Bahkan, transaksi politik masih kental memengaruhi hukum di Indonesia," sebut Zoelva

menambahkan, pembuatan produk hukum sudah rusak, maka penegakannya juga rusak.

Menurutnya, tidak jarang, produk hukum yang dihasilkan masih lebih mengutamakan kepentingan dan kompromi politik dibandingkan rakyat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya produk hukum yang dihasilkan DPR justru kemudian diuji (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Dia mengatakan, kasus Setya Novanto (Setnov) salah satu contoh penegakan hukum tidak

lepas dari intervensi politik. Seharusnya, Setnov selaku Ketua DPR memberikan contoh kepada rakyat bagaimana menghormati hukum. Bukan sebaliknya terkesan mempermainkan hukum.

"Drama Setnov seakan ini membangun opini publik, betapa sulitnya menerapkan hukum kepada pejabat tinggi negara; sebaliknya kepada rakyat kecil sangat mudah," ucapnya.

Sementara, Wakil Rektor IV UMA Prof Zulkarnain Lubis mengapresiasi kehadiran Prof Hamdan Zoelva berbagi ilmu dengan para mahasiswa UMA. Pencerahan tentang ilmu hukum yang disampaikan narasumber sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa dalam memahami hukum.

"Kehadiran mantan ketua MK dan sejumlah tokoh nasional maupun internasional ke UMA, merupakan bagian dari upaya UMA meningkatkan kualitas mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Karena itu, UMA akan terus menghadirkan orang-orang hebat, di samping meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas

HARIAN

REALITAS

Jumat, 2 Desember 2016

REALITAS 10

Direktur PTPN II Kuliah Umum di UMA: Perdagangan Bebas Diantisipasi dengan Kualitas SDM

**SAMPAIKAN KULIAH :**

Direktur SDM dan Umum PTPN III Ahmad Gusman Harahap saat menyampaikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Pertanian UMA, di Convention Hall Kampus I UMA.

Medan, Realitas

Salah satu tantangan yang dihadapi sektor perkebunan adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini harus diantisipasi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas produksi yang mampu bersaing di era perdagangan bebas.

Hal itu diungkapkan Direktur SDM dan Umum PTPN III Ahmad Gusman Harahap pada kuliah umum bertajuk "Trik dan Kiat Kerja ke PT Perkebunan Nusantara (Persero) dan Prospek Kelapa Sawit di Masa Depan", di hadapan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area (UMA) di Convention Hall Kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate, Kamis (24/11).

PTPN III Davod Haloho SP.

"Malaysia, Thailand dan Kamboja kini bersaing dengan Indonesia dalam pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN di bidang perkebunan. Ini harus diantisipasi dengan meningkatkan kualitas SDM dan produksi," tandas Gusman di hadapan ratusan mahasiswa pertanian.

Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam bisnis perkebunan adalah tuntutan pekerja, dalam hal ini harus berhadapan dengan serikat pekerja.

"Berdasarkan UU No 21 Tahun 2000 setiap perusahaan wajib memiliki serikat pekerja. Dalam satu bulan kita bertemu dengan serikat pekerja melihat dan menampung keluhan dan aspirasi pekerja," ujar

nis perkebunan diasumsikan merusak lingkungan.

"Padahal, asumsi tersebut tidak benar, karena sebelum membuka lahan perkebunan, perusahaan wajib mendapatkan berbagai izin dari pemerintah terkait persoalan lingkungan dan dampaknya," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur SDM dan Umum PTPN III ini memotivasi mahasiswa Pertanian UMA agar memiliki wawasan global, memiliki kompetensi yang berdaya saing tinggi, memiliki kemauan untuk tumbuh dan berkembang. "Mahasiswa pertanian harus mempunyai visi dan inovasi perubahan serta memiliki perilaku yang baik," tandasnya.

Dekan Fakultas Pertanian (FP) UMA Dr Syahbudin Habisuan MSi didampingi Kabag Humas UMA Ir Asmah Indrawati MP dan Wakil Dekan III FP UMA Ir Gustami Harahap MP mengatakan, kuliah umum dengan menghadirkan praktisi perkebunan tersebut bertujuan membuka cakrawala mahasiswa UMA agar memiliki mindset yang sesuai dengan kondisi perkebunan.

Pihaknya, katanya, terus berupaya membekali mahasiswa pertanian agar mendapat pengetahuan lapangan terhadap dunia kerja khususnya bidang perkebunan.

"Selain itu kita juga mem-

HARIAN Analisa

Jumat, 25 November 2016

Halaman 6

Direktur SDM PTPN III di UMA

Bisnis Perkebunan Miliki Beragam Tantangan

Medan, (Analisa)

Bisnis perkebunan diasumsikan merusak lingkungan. Padahal asumsi tersebut tidak benar karena sebelum membuka lahan perkebunan, perusahaan wajib mendapatkan berbagai izin dari pemerintah terkait persoalan lingkungan dan dampaknya.

Hal itu diungkapkan Direktur SDM dan Umum PTPN III, Ahmad Gusman Harahap pada kuliah umum di hadapan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area (UMA) di Convention Hall Kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate, Kamis (24/11).

Kuliah umum dipandu Ir Erwin Pane MS itu dibuka Dekan Fakultas Pertanian UMA, Dr Ir Syahbudin Hasibuan M.Si, juga menampilkan pembicara Asisten Produksi PTPN III, Davod

Haloho SP.

Lebih lanjut dikatakannya isu lingkungan dalam bisnis perkebunan. itu menjadi suatu tantangan agar dalam mengelola perkebunan selalu mempedulikan lingkungan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam bisnis perkebunan adalah tuntutan pekerja, dalam hal ini harus berhadapan dengan serikat pekerja.

"Berdasarkan UU Nomor 12 setiap perusahaan wajib memiliki serikat pekerja. Dalam satu bulan kita bertemu dengan serikat pekerja melihat dan menampung keluhan dan aspirasi pekerja," ujar Ahmad. Tantangan yang lain adalah persoalan sengketa lahan yang selalu dihadapi.

Selain itu tantangan yang dihadapi dalam bisnis perkebunan yakni perda-

ngan bebas. Perdangangan bebas ini harus diantisipasi dengan kualitas SDM dan kualitas produksi atau produk yang dihasilkan. Malaysia, Thailand dan Kamboja kini bersaing dengan Indonesia dalam pasar bebas.

Dia juga mengatakan faktor yang bisa dikendalikan dalam bisnis perkebunan adalah faktor produksi dan biaya. "Kedua faktor ini bisa kita kendalikan dalam bisnis perkebunan," ujarnya.

Direktur SDM dan Umum PTPN III ini juga memotivasi mahasiswa Pertanian UMA agar memiliki wawasan global, memiliki kompetensi yang berdaya saing tinggi, memiliki kemauan untuk tumbuh dan berkembang, harus mempunyai visi dan inovasi perubahan serta memiliki perilaku yang baik.

Didampingi Kabag Humas UMA, Ir Asmah Indrawati MP dan Wakil Dekan III Pertanian UMA, Ir Gustami Harahap MP, Dekan Peranian UMA, Dr Syahbudin Hasibuan M.Si mengatakan tujuan kuliah umum dengan menghadirkan praktisi perkebunan tersebut untuk membuka cakrawala mahasiswa UMA agar memiliki *mindset* yang sesuai dengan kondisi perkebunan.

Pihaknya, katanya terus berupaya membekali mahasiswa pertanian agar mahasiswa mendapat pengetahuan lapangan terhadap dunia kerja khususnya di bidang perkebunan.

"Selain itu kita juga membuat terobosan membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*. Sehingga lulusan Pertanian UMA sesuai dengan kebutuhan dunia kerja" ucap Dr Syahbudin seraya menyebutkan kuliah umum bertema "Trik dan Kiat Keria ke PT Perkebunan N-



Analisa/taufik wal hidayat

PA PARKAN: Direktur SDM dan Umum PTPN III, Ahmad Gusman Harahap memaparkan berbagai tantangan dalam bisnis perkebunan pada kuliah umum.

Published 1/4/19

HARIAN

andalas

Sabtu

26 November 2016

Hal. 9

Direktur PTPN III Kuliah Umum di UMA.

Perdagangan Bebas Harus Diantisipasi dengan Kualitas SDM

Medan-andalas

Salah satu tantangan yang dihadapi sektor perkebunan adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini harus diantisipasi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas produksi yang mampu bersaing di era perdagangan bebas.

Hal itu diungkapkan Direktur SDM dan Umum PTPN III Ahmad Gusman Harahap pada kuliah umum bertajuk "Trik dan Kiat Kerja ke PT Perkebunan Nusantara (Persero) dan Prospek Kelapa Sawit di Masa Depan," di hadapan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area (UMA) di Convention Hall Kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate, Kamis (24/11).

Kuliah umum yang dipandu Ir Erwin Pane MS dan dibuka Dekan Fakultas Pertanian UMA Dr Ir Syahbudin Hasibuan MSi itu, juga menampilkan pembicara Asisten Produksi PTPN III Davod Haloho SP.

"Malaysia, Thailand dan Kamboja kini bersaing dengan Indonesia dalam pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN di bidang perkebunan. Ini harus



Direktur SDM dan Umum PTPN III Ahmad Gusman Harahap saat menyampaikan kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Pertanian UMA, di Convention Hall Kampus I UMA.

bun adalah tuntunan pekerja, dalam hal ini harus berhadapan dengan serikat pekerja.

"Berdasarkan UU No 21 Tahun 2000 setiap perusahaan wajib memiliki serikat pekerja. Dalam satu bulan kita bertemu dengan serikat pekerja melihat dan menampung keluhan dan aspirasi pekerja," ujar Gusman.

Isu lingkungan dalam bisnis perkebunan, kata Gusman, juga menjadi suatu tantangan agar dalam mengelola perkebunan selalu mempedulikan ling-

perusahaan wajib mendapatkan berbagai izin dari pemerintah terkait persoalan lingkungan dampaknya," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur SDM dan Umum PTPN III ini memotivasi mahasiswa Pertanian UMA agar memiliki wawasan global, memiliki kompetensi yang berdaya saing tinggi, memiliki kemauan untuk tumbuh dan berkembang. "Mahasiswa pertanian harus mempunyai visi dan inoyasi perubahan serta memiliki perilaku

UMA Ir Gustami Harahap MP mengatakan, kuliah umum dengan menghadirkan praktisi perkebunan tersebut bertujuan membuka cakrawala mahasiswa UMA agar memiliki mindset yang sesuai dengan kondisi perkebunan.

Pihaknya, katanya, terus berupaya membekali mahasiswa pertanian agar mendapat pengetahuan lapangan terhadap dunia kerja khususnya di bidang perkebunan.

andalas | hamdani

BERITA UMUM

Medan **Bisnis**



Jumat, 9 Desember 2016

Direktur SDM PTPN III Motivasi Mahasiswa UMA

■ zahendra/rii

MedanBisnis – Medan

Direktur SDM dan Umum PTPN III Ahmad Gusman Harahap memotivasi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area (UMA) agar memiliki wawasan global, kompetensi yang berdaya saing tinggi, memiliki kemauan untuk tumbuh dan berkembang, harus mempunyai visi dan inovasi perubahan serta memiliki perilaku yang baik. Hal itu diungkapkan Direktur SDM dan Umum PTPN III, Ahmad Gusman Harahap pada kuliah umum di hadapan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area (UMA) di Convention Hall Kampus I UMA Jalan Kolam Medan Estate, belum lama ini.

Kuliah umum dipandu Ir Er-

win Pane MS itu dibuka Dekan Fakultas Pertanian UMA, Dr Ir Syahbudin Hasibuan MSi, juga menampilkan pembicara Asisten Produksi PTPN III, Davod Haloho SP. Menurut dia, bisnis perkebunan diasumsikan merusak lingkungan. Padahal asumsi tersebut tidak benar, karena sebelum membuka lahan perkebunan perusahaan wajib mendapatkan berbagai izin dari pemerintah terkait persoalan lingkungan dan dampaknya.

Dikatakan, isu lingkungan dalam bisnis perkebunan itu menjadi suatu tantangan agar dalam mengelola perkebunan selalu memperdulikan lingkungan. Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam bisnis perkebunan adalah tuntunan pekerja, dalam hal ini harus berhadapan dengan serikat pekerja.

“Berdasarkan UU Nomor 12 setiap perusahaan wajib memiliki serikat pekerja. Dalam satu bulan kita bertemu dengan serikat pekerja melihat dan menampung keluhan dan aspirasi pekerja. Tantangan yang lain adalah persoalan sengketa lahan yang selalu dihadapi,” kata Ahmad.

Disebutkan, dalam bisnis perkebunan juga ada tantangan yakni perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini harus diantisipasi dengan kualitas SDM dan kualitas produksi atau produk yang dihasilkan. “Negara Malaysia, Thailand dan Kamboja kini bersaing dengankita dalam pasar bebas,” katanya.

Dia juga mengatakan faktor yang bisa dikendalikan dalam bisnis perkebunan adalah faktor produksi dan biaya. “Kedua faktor ini bisa kita kendalikan dalam bisnis perkebunan,” ujarnya.

Didampingi Kabag Humas UMA, Ir Asmah Indrawati MP dan Wakil Dekan III Pertanian UMA, Ir Gustami Harahap MP, Dekan Pertanian UMA, Dr Syahbudin Hasibuan MSi mengatakan, tujuan kuliah umum dengan menghadirkan praktisi perkebunan tersebut untuk membuka cakrawala mahasiswa UMA agar memiliki mindset yang sesuai dengan kondisi perkebunan. Dikatakan, UMA terus berupaya membekali mahasiswa Pertanian agar mendapat pengetahuan lapangan terhadap dunia kerja di khususnya di bidang perkebunan. “Selain itu kita juga membuat terobosan membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Sehingga lulusan Pertanian UMA sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” ucap Dr Syahbudin. ●